

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	
3. NERACA KOMPARATIF.....	
4. LAPORAN OPERASIONAL.....	
5. LAPORAN ARUS KAS.....	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	
7.1. PENDAHULUAN.....	1
7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	5
7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	9
7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	11
7.5. PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN	14
7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	82
7.7. PENUTUP.....	84

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Data Ekonomi Makrom Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018- 2020	5
Tabel 3.1	Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan Pemkab Tana Toraja TA 2020.....	9
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Operasional.....	10
Tabel 5. 1	Rincian Pendapatan.....	17
Tabel 5. 2	Rincian Pendapatan Asli Daerah.....	17
Tabel 5. 3	Rincian Pendapatan Pajak Daerah.....	17
Tabel 5. 4	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah.....	18
Tabel 5. 5	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.....	19
Tabel 5. 6	Rincian Pendapatan Transfer.....	19
Tabel 5. 7	Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Pusat.....	20
Tabel 5. 8	Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak.....	20
Tabel 5. 9	Rincian Dana Alokasi Khusus.....	21
Tabel 5. 10	Rincian Dana Penyesuaian.....	21
Tabel 5. 11	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	22
Tabel 5. 12	Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Provinsi.....	23
Tabel 5. 13	Rincian Belanja.....	23
Tabel 5. 14	Rincian Belanja Operasi.....	23
Tabel 5. 15	Rincian Belanja Pegawai	24
Tabel 5. 16	Rincian Belanja Barang dan Jasa.....	24
Tabel 5. 17	Rincian Belanja Hibah.....	26
Tabel 5. 18	Rincian Belanja Modal	26
Tabel 5. 19	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	27
Tabel 5. 20	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	28
Tabel 5. 21	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28
Tabel 5. 22	Rincian Belanja Transfer	28
Tabel 5. 23	Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan.....	29
Tabel 5. 24	Rincian Pembiayaan.....	29
Tabel 5. 25	Rincian Komponen SiLPA	30
Tabel 5. 26	Komponen SiLPA Berupa Kas di Kas Daerah TA 2020	30
Tabel 5. 27	Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas	31
Tabel 5. 28	Rincian Aset	31
Tabel 5. 29	Rincian Aset Lancar	32
Tabel 5. 30	Rincian Kas.....	32
Tabel 5. 31	Rincian Kas Daerah	32
Tabel 5. 32	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	33
Tabel 5. 33	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah	35
Tabel 5. 34	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	37
Tabel 5. 35	Rincian Kas di BLUD	38
Tabel 5. 36	Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN	39
Tabel 5. 37	Rincian Kas di Bendahara Dana BOS	39
Tabel 5. 38	Rincian Saldo Pajak	39
Tabel 5. 39	Rincian Saldo Piutang Pajak.....	40
Tabel 5. 40	Rincian Saldo Piutang Retribusi.....	40
Tabel 5. 41	Rincian Saldo Piutang Lainnya	41
Tabel 5. 42	Rincian Saldo Piutang Dom Kendaraan Dinas	41
Tabel 5. 43	Rincian Persediaan.....	42

Tabel	5. 44	Rincian Investasi Jangka Panjang	43
Tabel	5. 45	Rincian Penyertaan Modal pada PDAM	44
Tabel	5. 46	Rincian Aset Tetap	45
Tabel	5. 47	Rincian Mutasi Aset Tetap.....	45
Tabel	5. 48	Rincian Mutasi Tanah	45
Tabel	5. 49	Komponen Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2020.....	46
Tabel	5. 50	Rincian Mutasi Alat-alat Berat Per 31 Desember 2020	46
Tabel	5. 51	Rincian Mutasi Alat-alat Angkutan Per 31 Desember 2020	47
Tabel	5. 52	Rincian Mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur.....	48
Tabel	5. 53	Rincian Mutasi Alat Pertanian Per 31 Desember 2020	49
Tabel	5. 54	Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga.....	49
Tabel	5. 55	Rincian Mutasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.....	50
Tabel	5. 56	Rincian Mutasi Alat Kedokteran dan Kesehatan.....	51
Tabel	5. 57	Rincian Mutasi Alat Laboratorium Per 31 Desember 2020.....	51
Tabel	5. 58	Rincian Mutasi Alat-Alat Persenjataan Per 31 Desember 2020	52
Tabel	5. 59	Komponen Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2020.....	53
Tabel	5. 60	Rincian Mutasi Bangunan Gedung Per 31 Desember 2020.....	54
Tabel	5. 61	Rincian Mutasi Monumen	55
Tabel	5. 62	Komponen Aset Tetap-Jalan,Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020.....	56
Tabel	5. 63	Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan.....	56
Tabel	5. 64	Rincian Mutasi Bangunan Air.....	57
Tabel	5. 65	Rincian Mutasi Instalasi.....	57
Tabel	5. 66	Rincian Mutasi Jaringan.....	58
Tabel	5. 67	Komponen Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2020.....	59
Tabel	5. 68	Rincian Mutasi Bahan Perpustakaan	59
Tabel	5. 69	Rincian Mutasi Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.....	60
Tabel	5. 70	Rincian Mutasi Hewan	60
Tabel	5. 71	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	61
Tabel	5. 72	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	61
Tabel	5. 73	Rincian Aset Lainnya.....	62
Tabel	5. 74	Rincian Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	63
Tabel	5. 75	Rincian Aset Tidak Berwujud (Software).....	63
Tabel	5. 76	Komponen Aset Lainnya-Aset Lain-lain Tahun 2020.....	64
Tabel	5. 77	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	64
Tabel	5. 78	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	64
Tabel	5. 79	Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi	65
Tabel	5. 80	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	65
Tabel	5. 81	Rincian Kewajiban.....	66
Tabel	5. 82	Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....	66
Tabel	5. 83	Rincian Utang PFK.....	66
Tabel	5. 84	Rincian Utang Belanja	67
Tabel	5. 85	Rincian Pendapatan LO.....	68
Tabel	5. 86	Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO	68
Tabel	5. 87	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO.....	69
Tabel	5. 88	Rincian Lain-lain PAD yang Sah - LO	69
Tabel	5. 89	Rincian Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat - LO.....	70
Tabel	5. 90	Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak Pemerintah Pusat- LO.....	70
Tabel	5. 91	Rincian Dana Alokasi Khusus - LO.....	71
Tabel	5. 92	Rincian Dana Penyesuaian- LO.....	71
Tabel	5. 93	Rincian Hibah – LO	72
Tabel	5. 94	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO.....	72
Tabel	5. 95	Rincian Beban Pegawai - LO.....	73
Tabel	5. 96	Rincian Beban Persediaan - LO.....	73
Tabel	5. 97	Rincian Beban Jasa – LO.....	74

Tabel	5. 98	Rincian Beban Pemeliharaan - LO.....	74
Tabel	5. 99	Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO	75
Tabel	5. 100	Rincian Beban Transfer.....	76
Tabel	5. 101	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi.....	76
Tabel	5. 102	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....	77
Tabel	5. 103	Rincian Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi.....	77
Tabel	5. 104	Rincian Arus Kas Bersih Untuk Aktivitas Investasi.....	77
Tabel	5. 105	Rincian Arus Kas Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi.....	78
Tabel	5. 106	Rincian Arus Kas untuk Aktivitas Transistoris/Non Anggaran.....	79
Tabel	5. 107	Rincian Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode 2020.....	79
Tabel	5. 108	Rincian Koreksi Ekuitas.....	80

LAMPIRAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lampiran 1	Rincian Pendapatan Tahun Anggaran 2020
Lampiran 2	Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020
Lampiran 3	Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020
Lampiran 4	Kas di Bendahara JKN 2020
Lampiran 5	Kas Dana BOS
Lampiran 6	Piutang Pajak per 31 Desember 2020
Lampiran 7	Piutang Retribusi per 31 Desember 2020
Lampiran 8	Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020
Lampiran 9	Saldo Persediaan OPD per 31 Desember 2020
Lampiran 10	Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2020
Lampiran 11	Invenstasi Non Permanan Bantuan Ternak per 31 Desember 2020
Lampiran 12	Rincian Aset Tetap
Lampiran 13	Rincian Aset Tidak Berwujud Tahun 2020
Lampiran 14	Rincian Aset Lain-lain (Rusak Berat) per 31 Desember 2020
Lampiran 15	Penyusutan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020
Lampiran 16	Penyusutan Aset Lain-lain (Rusak Berat)
Lampiran 17	Rincian Utang ke Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2020
Lampiran 18	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020

Kata Pengantar

Keinginan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan mengelola secara mandiri sumber daya yang dimiliki, kini mulai menjadi kenyataan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 29 ayat 2 mengatur bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan 11 (sebelas) kewenangan kepada Daerah yang dimaksudkan semata-mata untuk dapat mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat.

Dengan penyerahan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah tersebut, maka dituntut suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang **akuntabel** dan **transparan**. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas dan adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan yang disajikan ini diharapkan dapat memenuhi pelaporan yang akuntabel dan transparan atas seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah serta dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder's).

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Laporan Keuangan dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan keuangan ini.

BUPATI TANA TORAJA

THEOFILUS ALLORERUNG



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Pada dasarnya LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, Lembaga Pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2020.

LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2020);



17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Nomor 29 Tahun 2020);
18. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
19. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD;

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah;
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu;

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan LRA;
 - 5.1.2 Belanja;
 - 5.1.3 Transfer;
 - 5.1.4 Pembiayaan;
- 5.2 Laporan Perubahan SAL
 - 5.2.1 Perubahan SAL
- 5.3 Neraca
 - 5.3.1 Aset;
 - 5.3.2 Kewajiban;
 - 5.3.3 Ekuitas;
- 5.4 Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan LO;
 - 5.4.2 Beban;
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional;
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa;



- 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1 Perubahan Ekuitas;

Bab VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Data-data yang diperoleh dari buku Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2021, penduduk Kabupaten Tana Toraja di tahun 2020 sebanyak 280.794 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 mencapai 137 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 19 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makale dengan kepadatan sebesar 976 jiwa/ km² dan terendah di Kecamatan Bongkaradeng sebesar 39 jiwa/ km².

Data Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Data Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 - 2020

Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Ketenagakerjaan			
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	79,71	78,50	73,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0,13	2,74	2,60
Gini Ratio	0,369	0,362	0,348
Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,89	7,22	-0,28
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,66	67,25	68,75
Kemiskinan			
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	29,65	28,71	28,41
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	12,75	12,35	12,10
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,15	2,27	2,25
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,55	1,12	0,74
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	299.570	316.911	284.1000

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Toraja memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD juga disusun dengan mengacu pada RPJP Kabupaten Tana Toraja, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan/Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJP Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk sasaran pembangunan *Millenium Development Goals (MDGs)*. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja setiap tahun.

Dalam Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila



hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal serta tabungan dan investasi.

Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan semakin rendah. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerapkan kebijakan umum bidang keuangan daerah sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya sektor usaha swasta dalam semua ukuran, baik menengah maupun kecil yang akan berfungsi sebagai subyek pajak dan retribusi baru;
2. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dengan cara:
 - a. Mengusulkan rencana program dan kegiatan untuk setiap bidang pemerintahan yang dapat disampaikan kepada pemerintah melalui forum Musrenbang Propinsi dan Nasional,
 - b. Mendorong pimpinan OPD untuk melakukan koordinasi dengan Kementrian Teknis di tingkat pusat,
 - c. Menjalin hubungan kerja dan komunikasi yang intensif dengan para pelaku ekonomi daerah dan nasional untuk melakukan investasi di Kabupaten Tana Toraja,
 - d. Menerbitkan profil investasi pada berbagai sektor potensial untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
3. Memberikan kemudahan perizinan kepada investor yang terkait untuk penanaman modal di Kabupaten Tana Toraja,
4. Penajaman skala prioritas program dan kegiatan yang paling banyak memberikan kontribusi kepada upaya pencapaian visi dan misi daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penerapan kebijakan pendapatan antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan melalui upaya pemutakhiran data sumber-sumber pendapatan daerah,
2. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD agar menghasilkan penerimaan,
3. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru,



4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan dan perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan sumber-sumber pendapatan daerah,
5. Perbaikan dan pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan publik,
6. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja disusun dengan pendekatan anggaran belanja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur APBD Kabupaten Tana Toraja dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dalam mewujudkan visi dan misi daerah yang dianggarkan pada belanja OPD.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja sepanjang periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya APBD yang semakin sehat. Ini harus diwujudkan melalui penyehatan ratio alokasi antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung terutama untuk menyehatkan ratio antara gaji dan upah dengan belanja barang, jasa dan modal. Besaran belanja honor dan upah bagi tiap-tiap OPD diupayakan agar berada dalam keseimbangan yang rasional dengan belanja modal, barang dan jasa serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran,
3. Memberikan prioritas yang lebih tinggi bagi program yang menunjang upaya pencapaian visi misi daerah.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.



Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk mengatasi permasalahan umum yang sering terjadi dalam bidang pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Seluruh OPD wajib menyusun rencana pagu kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada Standar Analisa Belanja dan Harga Satuan Setempat,
2. Penggunaan SILPA dalam bentuk pemberian Anggaran Belanja Tambahan diutamakan kepada OPD yang mengajukan rencana tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang terukur, bukan untuk penambahan belanja tidak langsung.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Target Kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 adalah target yang ditetapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatannya dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.

Secara umum target APBD Kabupaten Tana Toraja tercapai sesuai target yang ditetapkan. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.169.018.453.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.132.684.863.534,75 atau 96,89 %. Tercapainya pendapatan ini merupakan kontribusi pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan target sebesar Rp1.043.458.479.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.021.748.800.022,56 atau 97,92%. Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp125.559.974.000,00 dengan realisasi sebesar Rp110.936.063.512,19 atau 88,35%.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja ditetapkan sebesar Rp1.255.474.940.000,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp125.559.974.000,00. Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.043.458.479.000,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp86.456.487.000,00).

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja TA 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	%
I. Pendapatan	1.169.018.453.000,00	1.132.684.863.534,75	96,89
I.1. Pendapatan Asli Daerah	125.559.974.000,00	110.936.063.512,19	88,35
I.2. Dana Transfer	888.702.783.000,00	881.258.523.730,00	99,16
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	154.755.696.000,00	140.490.276.292,56	90,78
II. Belanja	1.067.319.774.800,00	925.348.493.641,58	86,70
II.1. Belanja Operasi	740.416.718.482,00	677.308.206.918,05	91,48
II.2. Belanja Modal	263.618.506.318,00	191.525.186.723,53	72,65
II.3. Belanja Tidak Terduga	63.284.550.000,00	56.515.100.000,00	89,30
III. Transfer	188.155.165.200,00	186.894.411.198,00	99,33
III.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	400.000.000,00	332.377.150,00	83,09
III.2. Transfer Bantuan Keuangan	187.755.165.200,00	186.562.034.048,00	99,36
Surplus/(Defisit)	(86.456.487.000,00)	20.441.958.695,17	(23,64)
III. Pembiayaan	86.456.487.000,00	36.456.486.410,23	42,17
III.1. Penerimaan	86.456.487.000,00	36.456.486.410,23	42,17
III.2. Pengeluaran			
Pembiayaan Netto	86.456.487.000,00	36.456.486.410,23	42,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebelum Koreksi	0,00	56.898.445.105,40	
Koreksi SiLPA	0,00	0,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah Koreksi	0,00	56.898.445.105,40	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, secara umum realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.132.684.863.534,75 atau 96,89% belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.169.018.453.000,00. Untuk Pendapatan Transfer, realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp881.258.523.730,00 dari target anggaran sebesar Rp888.702.783.000,00.

Untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp140.490.276.292,56. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

1. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;



2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada Tahun Anggaran 2020 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.255.474.940.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.112.242.904.839,58 atau 88,59% sehingga masih terdapat efisiensi belanja sebesar Rp143.232.035.160,42. Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp740.416.718.482,00 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp677.308.206.918,05 atau sebesar 91,48%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasional ini terdiri atas:

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Operasional

(dalam rupiah)

No	Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	452.595.162.780,00	441.762.507.116,00	97,61
2	Belanja Barang dan Jasa	218.836.221.920,00	170.993.682.474,05	78,14
3	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
4	Belanja Hibah	67.467.333.782,00	63.034.017.328,00	93,43
5	Belanja Bantuan Sosial	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
	Jumlah	740.416.718.482,00	677.308.206.918,05	91,48

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2020 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Tana Toraja (baik pajak maupun retribusi daerah).
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja.
4. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.
5. Adanya pandemi COVID-19.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
2. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/badan/kantor dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari OPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Kebijakan Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 dan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:



1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah.
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan- LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode yang digunakan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 2) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya.

c. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- 2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan sebagai berikut:

9. Penyisihan Dana Bergulir

- a. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas Dana Bergulir didasarkan pada kondisi masing-masing dana bergulir pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (aging schedule) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
- Kurang dari 1 tahun disisihkan sebesar 0,5% dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 10% dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 50% dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - Diatas 5 tahun disisihkan sebesar 100% dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



10. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- b. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Tanah
 - 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap bulan tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa (nilai residu).
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap diklasifikasikan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bagian ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO. Di samping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2020.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2020 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2020.

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing di bandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun 2020 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; dan (iii) Penegakan Perda Pendapatan.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja Daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, (iii) Belanja Tak Terduga, dan (iv) Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.



1. Pendapatan	2020	2019
	Rp1.132.684.863.534,75	Rp1.190.812.429.313,08

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.169.018.453.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.132.684.863.534,75 atau mencapai 96,89% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
	PENDAPATAN	1.169.018.453.000,00	1.132.684.863.534,75	96,89	1.190.812.429.313,08
A.	Pendapatan Asli Daerah	125.559.974.000,00	110.936.063.512,19	88,35	119.464.168.341,55
B.	Pendapatan Transfer	888.702.783.000,00	881.258.523.730,00	99,16	937.957.468.509,00
C.	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	154.755.696.000,00	140.490.276.292,56	90,78	133.390.792.462,53

Rincian pendapatan per kode rekening dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

a. Pendapatan Asli Daerah	2020	2019
	Rp110.936.063.512,19	Rp119.464.168.341,55

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp110.936.063.512,19 dan Rp119.464.168.341,55. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp125.559.974.000,00 sehingga realisasi sebesar 88,35%.

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		Kenaikan/ Penurunan	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Pajak Daerah	11.000.000.000,00	11.028.317.168,50	(1.338.133.676,50)	12.366.450.845,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.000.000.000,00	7.163.530.253,75	(5.640.181.173,25)	12.803.711.427,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.500.000.000,00	8.599.872.702,00	1.156.172.962,00	7.443.699.740,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	95.059.974.000,00	84.144.343.387,94	(2.705.962.941,61)	86.850.306.329,55
	Jumlah	125.559.974.000,00	110.936.063.512,19	(8.528.104.829,36)	119.464.168.341,55

1) Pendapatan Pajak Daerah	2020	2019
	Rp11.028.317.168,50	Rp12.366.450.845,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari Wajib Pajak dalam Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp11.028.317.168,50. Rincian pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pajak Hotel	500.000.000,00	280.728.734,00	56,15	392.191.015,00
2	Pajak Restoran	450.000.000,00	310.004.636,00	68,89	460.864.150,00
3	Pajak Hiburan	25.000.000,00	16.025.320,00	64,10	13.052.500,00
4	Pajak Reklame	680.000.000,00	770.828.423,00	113,36	503.444.503,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.500.000.000,00	4.887.584.500,00	108,61	4.836.839.134,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	950.000.000,00	1.109.684.340,00	116,81	1.816.818.914,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.770.000.000,00	2.428.634.736,00	87,68	2.867.498.644,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.125.000.000,00	1.224.826.479,50	108,87	1.475.741.985,00
Jumlah		11.000.000.000,00	11.028.317.168,50	100,26	12.366.450.845,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah	2020 <u>Rp7.163.530.253,75</u>	2019 <u>Rp12.803.711.427,00</u>
---------------------------------------	--	---

Retribusi Daerah adalah Penerimaan Asli Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari Wajib Retribusi dalam Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp7.163.530.253,75. Rincian retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	775.000.000,00	896.557.347,00	115,68	770.090.200,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	62.820.000,00	41,88	127.035.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	90.570.000,00	18,11	409.950.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	891.000.000,00	318.448.500,00	35,74	736.877.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	130.200.000,00	130,20	113.023.500,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.250.000,00	79.250.000,00	391,36	2.000.000,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	180.000.000,00	136.515.200,00	75,84	200.214.400,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	610.000.000,00	346.080.425,00	56,73	476.705.000,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	450.000.000,00	91.281.000,00	20,28	348.415.000,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00	67.080.000,00	26,83	161.000.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	2.210.250.000,00	2.451.320.000,00	110,91	3.036.707.500,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.943.500.000,00	1.464.905.000,00	49,77	5.691.402.052,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	300.000,00	1,00	5.650.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000,00	981.232.781,75	122,65	651.681.275,00
15	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Retribusi Izin Trayek	70.000.000,00	21.501.000,00	30,72	69.607.000,00
17	Tunggakan Retribusi Pasar	10.000.000,00	25.469.000,00	254,69	3.353.000,00
Jumlah		10.000.000.000,00	7.163.530.253,75	71,64	12.803.711.427,00

3) Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2020 <u>Rp8.599.872.702,00</u>	2019 <u>Rp7.443.699.740,00</u>
---	--	--

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang diperoleh dari bagian laba (deviden) atas modal yang ditanamkan atau disertakan PT. Bank Sulselbar dalam Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa Nomor 02 tanggal 2 Desember 2020.



4) Lain lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	2020	2019
	Rp84.144.343.387,94	Rp86.850.306.329,55

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan asli daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2020, jumlah Lain-lain PAD yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluruhnya sebesar Rp84.144.343.387,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rincian Lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	249.239.000,00	0,00	0,00	106.162.266,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	92.369.000,00	100,00	61.230.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro	9.058.318.000,00	2.655.284.929,00	29,31	2.247.223.817,00
4	Pendapatan Bunga	9.507.000.000,00	1.733.219.177,00	18,23	2.383.287.657,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.000.000.000,00	4.064.359.066,46	203,22	3.891.311.671,36
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	468.137.817,00	100,00	383.238.141,66
7	Pendapatan Denda Pajak	5.000.000,00	2.518.607,00	50,37	3.604.709,32
8	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.313.294.406,00	100,00	797.403.834,00
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	71.240.417.000,00	69.815.160.385,48	98,00	76.976.844.233,21
10	Pendapatan dari Pengembalian Dana Tidak Terduga	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	133,33	0,00
	Jumlah	95.059.974.000,00	84.144.343.387,94	88,52	86.850.306.329,55

b. Pendapatan Transfer	2020	2019
	Rp881.258.523.730,00	Rp937.957.468.509,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 sebesar Rp881.258.523.730,00. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Transfer tahun 2020 sebesar Rp888.702.783.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp881.258.523.730,00 atau sebesar 99,16%.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2020	2019
	Rp648.460.785.466,00	Rp711.612.943.872,00

Tabel 5.6 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		Bertambah/ Berkurang	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.397.559.000,00	11.426.556.537,00	3.988.997.995,00	7.437.558.542,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.752.127.000,00	4.125.943.519,00	(1.476.640.989,00)	5.602.584.508,00
3	Dana Alokasi Umum	549.165.995.000,00	544.504.787.000,00	(47.879.514.000,00)	592.384.301.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	92.202.614.000,00	88.403.498.410,00	(17.785.001.412,00)	106.188.499.822,00
	Jumlah	656.518.295.000,00	648.460.785.466,00	(63.152.158.406,00)	711.612.943.872,00



a) Dana Bagi Hasil Pajak	2020	2019
	Rp11.426.556.537,00	Rp7.437.558.542,00

Bagi Hasil Pajak merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun Anggaran 2020, jumlah bagi hasil pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluruhnya sejumlah Rp11.426.556.537,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	3.745.557.000,00	3.680.137.935,00	98,25	4.768.435.142,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	6.652.002.000,00	7.746.418.602,00	116,45	2.669.123.400,00
Jumlah		10.397.559.000,00	11.426.556.537,00	109,90	7.437.558.542,00

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2020	2019
	Rp4.125.943.519,00	Rp5.602.584.508,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun Anggaran 2020, jumlah bagi hasil bukan pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluruhnya sejumlah Rp4.125.943.519,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak – Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	26.348.000,00	28.376.422,00	107,70	9.654.000,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	0,00	0,00	0,00	32.995.200,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	3.020.001.352,00	100,00	2.563.008.971,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan -	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	590.155.800,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	91.656,00	100,00	123.530,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	292.491.000,00	289.197.800,00	98,87	1.505.812.000,00
7	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batuan	3.014.927.000,00	0,00	0,00	900.835.007,00
Jumlah		4.752.127.000,00	4.125.943.519,00	86,82	5.602.584.508,00

c) Dana Alokasi Umum	2020	2019
	Rp544.504.787.000,00	Rp592.384.301.000,00

Dana Alokasi Umum merupakan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah. Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerima Dana Alokasi Umum sejumlah Rp544.504.787.000,00 atau sebesar 99,15% dari yang



dianggarkan. Dana Alokasi Umum berkurang sebesar Rp47.879.514.000,00 pada tahun anggaran 2020.

d) Dana Alokasi Khusus	2020	2019
	Rp88.403.498.410,00	Rp106.188.499.822,00

Dana Alokasi Khusus merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk membiayai kebutuhan khusus (*specific grant*). Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerima Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp88.403.498.410,00 atau sebesar 95,88% dari yang dianggarkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Rincian Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	21.938.748.000,00	21.596.354.000,00	98,44	39.168.685.659,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	1.248.063.000,00	1.177.262.782,00	94,33	1.659.039.750,00
3	DAK Bidang Kesehatan	32.887.337.000,00	31.133.727.516,00	94,67	34.858.627.337,00
4	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.178.268.000,00	1.067.649.183,00	90,61	782.956.300,00
5	DAK Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	819.492.250,00
6	DAK Bidang Pertanian	1.108.000.000,00	1.108.000.000,00	100,00	940.131.250,00
7	DAK Bidang Pendidikan	19.572.385.000,00	19.572.385.000,00	100,00	13.149.808.000,00
8	DAK Bidang Irigasi	1.435.166.000,00	1.280.893.300,00	89,25	3.536.312.276,00
9	DAK Bidang Pariwisata	4.949.583.000,00	3.828.762.629,00	77,36	4.422.700.000,00
10	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	3.577.643.000,00	3.520.843.000,00	98,41	0,00
11	DAK Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00	3.320.995.000,00
12	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	1.879.752.000,00
13	DAK Bidang Sanitasi	4.307.421.000,00	4.117.621.000,00	95,59	1.650.000.000,00
Jumlah		92.202.614.000,00	88.403.498.410,00	95,88	106.188.499.822,00

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Lainnya	2020	2019
	Rp232.797.738.264,00	Rp226.344.524.637,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Lembang. Pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sejumlah Rp232.797.738.264,00 atau sebesar 100,26%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
Dana Penyesuaian					
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.173.750.000,00	1.477.904.000,00	125,91	1.455.000.000,00
2	Tunjangan Profesi Guru	62.253.317.000,00	62.253.317.000,00	100,00	63.845.165.848,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.161.400.000,00	3.161.400.000,00	100,00	2.014.800.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	22.886.797.000,00	27.976.390.713,00	122,24	20.151.087.089,00
5	Akreditasi Puskesmas	1.334.308.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Jaminan Persalinan	903.117.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Bantuan Operasional KB	5.164.520.000,00	4.312.869.173,00	83,51	4.054.297.500,00
8	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.170.023.000,00	1.138.383.755,00	97,30	1.287.288.200,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
9	Tunjangan Khusus Guru	7.350.526.000,00	7.350.526.000,00	100,00	6.108.254.000,00
10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.316.000.000,00	902.350.000,00	68,57	1.550.600.000,00
11	Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	340.849.598,00	99,07	913.038.000,00
12	Pengawasan Obat dan Makanan	159.328.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	417.358.000,00	100,00	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian		107.634.494.000,00	109.331.348.239,00	101,58	101.379.530.637,00
Dana Lembang					
1	Dana Lembang	124.549.994.000,00	123.466.390.025,00	99,13	124.964.994.000,00
Jumlah		232.184.488.000,00	232.797.738.264,00	100,26	226.344.524.637,00

c Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2020	2019
	<u>Rp140.490.276.292,56</u>	<u>Rp133.390.792.462,53</u>

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 sebesar Rp140.490.276.292,56. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah tahun 2020 sebesar Rp154.755.696.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp140.490.276.292,56 atau sebesar 90,78% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		Kenaikan/Penurunan	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Hibah	71.824.155.000,00	62.988.294.638,00	4.655.467.379,09	58.332.827.258,91
2	Pendapatan Lainnya	39.991.515.000,00	38.535.511.254,56	(7.444.572.249,06)	45.980.083.503,62
3	Bantuan Keuangan	42.940.026.000,00	38.966.470.400,00	9.888.588.700,00	29.077.881.700,00
Jumlah		154.755.696.000,00	140.490.276.292,56	7.099.483.830,03	133.390.792.462,53

1) Pendapatan Hibah	2020	2019
	<u>Rp62.988.294.638,00</u>	<u>Rp58.332.827.258,91</u>

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merealisasikan pendapatan hibah tahun 2020 sebesar Rp62.988.294.638,00 yang terdiri dari pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri sebesar Rp19.135.206.657,00 dan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp43.853.087.981,00. Pendapatan BOS merupakan pendapatan yang ditransfer dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke sekolah dan di sahkan di BPKAD menggunakan SP2B dan SP3B.

2) Pendapatan Lainnya	2020	2019
	<u>Rp38.535.511.254,56</u>	<u>Rp45.980.083.503,62</u>

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diperoleh dari Pemerintah Sulawesi Selatan. Pada Tahun Anggaran 2020 jumlah dana bagi hasil pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sejumlah Rp38.535.511.254,56 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.12 Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.500.000.000,00	7.714.036.348,00	90,75	9.942.586.962,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.000.000.000,00	4.917.665.669,00	70,25	7.929.890.366,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.500.000.000,00	10.170.270.147,00	88,44	13.189.460.965,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	304.119.000,00	183.968.391,00	60,49	311.609.485,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	12.500.000.000,00	15.280.206.153,56	122,24	14.368.850.034,62
6	Bagi Hasil Bea Cukai dari Hasil Tembakau	187.396.000,00	178.658.130,00	95,34	237.685.691,00
7	Bagi Hasil Getah Pinus	0,00	90.706.416,00	100,00	0,00
Jumlah		39.991.515.000,00	38.535.511.254,56	96,36	45.980.083.503,62

3) Bantuan Keuangan	2020	2019
	<u>Rp38.966.470.400,00</u>	<u>Rp29.077.881.700,00</u>

Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam periode Tahun Anggaran 2020 terealisasi sejumlah Rp38.966.470.400,00 atau sebesar 90,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.940.026.000,00.

2. BELANJA	2020	2019
	<u>Rp925.348.493.641,58</u>	<u>Rp979.371.368.464,91</u>

Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp1.067.319.774.800,00 dan terealisasi sebesar Rp925.348.493.641,58 atau mencapai 86,70% dari anggaran. Realisasi belanja daerah sebesar Rp925.348.493.641,58 dialokasikan untuk:

Tabel 5.13 Rincian Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Operasi	740.416.718.482,00	677.308.206.918,05	91,48	756.015.371.017,28
2	Belanja Modal	263.618.506.318,00	191.525.186.723,53	72,65	221.999.197.447,63
3	Belanja Tak Terduga	63.284.550.000,00	56.515.100.000,00	89,30	1.356.800.000,00
Jumlah		1.067.319.774.800,00	925.348.493.641,58	86,70	979.371.368.464,91

a. Belanja Operasi	2020	2019
	<u>Rp677.308.206.918,05</u>	<u>Rp756.015.371.017,28</u>

Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran belanja operasi dialokasikan sebesar Rp740.416.718.482,00 dan terealisasi sebesar Rp677.308.206.918,05 atau mencapai 91,48% dari anggaran. Realisasi belanja operasi sebesar Rp677.308.206.918,05 dialokasikan sebagai berikut:

Tabel 5.14 Rincian Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Pegawai	452.595.162.780,00	441.762.507.116,00	97,61	463.468.711.166,00
2	Belanja Barang dan Jasa	218.836.221.920,00	170.993.682.474,05	78,14	259.507.402.251,37
3	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah	67.467.333.782,00	63.034.017.328,00	93,43	33.021.257.599,91
5	Belanja Bantuan Sosial	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
Jumlah		740.416.718.482,00	677.308.206.918,05	91,48	756.015.371.017,28



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.202.560.000,00	772.622.000,00	64,25	2.869.004.200,00
13	Belanja Pakaian Kerja	47.200.000,00	47.200.000,00	100,00	390.562.200,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	342.400.000,00	319.000.000,00	93,17	1.359.264.200,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	20.369.628.000,00	16.786.346.742,00	82,41	39.616.217.728,00
16	Belanja Pemeliharaan	8.253.234.700,00	5.084.510.484,00	61,61	10.448.987.821,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	1.739.848.200,00	1.033.561.300,00	59,41	3.513.340.630,00
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	207.000.000,00	207.000.000,00	100,00	54.600.000,00
19	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	533.000.000,00	175.245.900,00	32,88	4.265.815.015,00
20	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.373.921.300,00
21	Belanja Barang Tanggap Darurat	94.933.000,00	91.990.000,00	96,90	282.856.000,00
22	Belanja Jasa Pihak Ketiga	57.638.446.000,00	35.765.156.915,00	62,05	63.130.155.483,00
23	Belanja Operasional Manajemen Mutu	0,00	0,00	0,00	1.638.500.000,00
24	Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	832.600.000,00	596.850.800,00	71,69	695.456.650,00
25	Belanja Barang Dana BOS	29.398.811.000,00	25.038.694.690,00	85,17	26.394.782.408,00
26	Belanja Buku Putusan Pengadilan	1.000.000,00	500.000,00	50,00	1.250.000,00
27	Belanja Barang dan Jasa BOK	14.855.488.000,00	9.256.422.650,00	62,31	12.239.648.086,00
28	Belanja Barang dan Jasa JKN	4.665.858.878,00	3.380.603.619,00	72,45	3.636.927.215,00
29	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	22.462.658.020,00	21.999.222.196,05	97,94	22.260.945.131,37
	Jumlah	218.836.221.920,00	170.993.682.474,05	78,14	259.507.402.251,37

3) Belanja Subsidi	2020	2019
	Rp1.500.000.000,00	Rp0,00

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 atau mencapai 100%.

4) Belanja Hibah	2020	2019
	Rp63.034.017.328,00	Rp33.021.257.599,91

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018, Belanja Hibah dibagi menjadi hibah berupa uang, barang dan jasa. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah. Hibah berupa barang dan jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis



belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Khusus realisasi hibah barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dengan format konversi dan pengungkapan berpedoman pada Lampiran II Permendagri 39 Tahun 2012.

Pada Tahun Anggaran 2020 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp67.467.333.782,00 dan terealisasi sebesar Rp63.034.017.328,00 atau mencapai 93,43% dari anggaran. Rincian realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17 Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	15.161.837.782,00	13.502.221.328,00	89,05	7.284.444.251,00
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.735.000.000,00	675.000.000,00	24,68	3.540.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	49.570.496.000,00	48.856.796.000,00	98,56	22.196.813.348,91
	Jumlah	67.467.333.782,00	63.034.017.328,00	93,43	33.021.257.599,91

5) Belanja Bantuan Sosial	2020	2019
	<u>Rp18.000.000,00</u>	<u>Rp18.000.000,00</u>

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada pihak lain. Pada Tahun Anggaran 2020 belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.000.000,00 atau mencapai 100,00%.

b. Belanja Modal	2020	2019
	<u>Rp191.525.186.723,53</u>	<u>Rp221.999.197.447,63</u>

Pada Tahun Anggaran 2020 Anggaran Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp263.618.506.318,00 dan terealisasi sebesar Rp191.525.186.723,53 atau mencapai 72,65% dari anggaran. Realisasi belanja modal sebesar Rp191.525.186.723,53 dialokasikan untuk:

Tabel 5.18 Rincian Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Tanah	1.600.000.000,00	0,00	0,00	563.500.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.456.122.317,00	37.569.459.855,60	123,36	30.433.026.086,53
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.917.137.746,00	31.170.135.375,00	86,78	69.585.676.567,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.267.626.255,00	119.144.404.176,93	61,97	118.489.964.490,10
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.377.620.000,00	3.641.187.316,00	107,80	2.927.030.304,00
	Jumlah Belanja Modal	263.618.506.318,00	191.525.186.723,53	72,65	221.999.197.447,63

1) Belanja Modal Tanah	2020	2019
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp563.500.000,00</u>

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar Rp1.600.000.000,00 tidak terealisasi.



2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2020	2019
	Rp37.569.459.855,60	Rp30.433.026.086,53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja yang menambah aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp37.569.459.855,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	30.000.000,00	29.815.000,00	99,38	181.833.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	3.888.255.000,00	3.511.073.999,00	90,30	8.845.006.262,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	404.745.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	103.480.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	87.783.545,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor	266.550.000,00	188.115.000,00	70,57	438.997.182,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	447.342.001,00	269.976.400,00	60,35	215.290.795,00
8	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.169.568.400,00	868.489.300,00	74,26	2.330.456.200,00
9	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	435.824.000,00	383.943.500,00	88,10	1.025.747.200,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	884.960.000,00	233.160.000,00	26,35	320.275.600,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	63.800.000,00	63.800.000,00	100,00	931.654.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	8.545.700.000,00	8.452.554.793,60	98,91	1.859.049.841,53
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	5.144.633.849,00	4.943.427.286,00	96,09	3.699.219.055,00
14	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	99.706.200,00
15	Belanja Modal DAK Pendidikan	1.458.000.000,00	1.458.000.000,00	100,00	1.469.640.000,00
16	Belanja Modal Dana BOS	6.800.000.000,00	16.136.768.125,00	237,31	7.394.315.440,00
17	Belanja Modal JKN	1.321.489.067,00	1.030.336.452,00	77,97	1.024.326.766,00
18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Jumlah	30.456.122.317,00	37.569.459.855,60	123,36	30.433.026.086,53

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2020	2019
	Rp31.170.135.375,00	Rp69.585.676.567,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja yang menambah aset tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berupa konstruksi gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp35.917.137.746,00 dan terealisasi sebesar Rp31.170.135.375,00 atau mencapai 86,78%.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2020	2019
	Rp119.144.404.176,93	Rp118.489.964.490,10

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan belanja yang menambah aset tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berupa konstruksi jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp119.144.404.176,93 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.20 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	178.097.816.246,00	105.764.518.945,93	59,39	109.381.216.660,10
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.025.678.009,00	2.459.365.117,00	81,28	5.530.884.330,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.045.400.000,00	841.260.000,00	80,47	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10.058.982.000,00	10.039.510.114,00	99,81	259.219.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	39.750.000,00	39.750.000,00	100,00	3.318.644.500,00
	Jumlah	192.267.626.255,00	119.144.404.176,93	61,97	118.489.964.490,10

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2020	2019
	<u>Rp3.641.187.316,00</u>	<u>Rp2.927.030.304,00</u>

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja yang menambah aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam periode Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp3.641.187.316,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	50.000.000,00	49.995.314,00	99,99	542.483.096,00
2	Belanja Modal untuk BLUD RSUD Laki pada	3.324.070.000,00	3.591.192.002,00	108,04	2.384.547.208,00
3	Belanja modal Pengadaan Tanaman	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.377.620.000,00	3.641.187.316,00	79,71	2.297.030.304,00

c. Belanja Tidak Terduga	2020	2019
	<u>Rp56.515.100.000,00</u>	<u>Rp1.356.800.000,00</u>

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Dalam periode Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp63.284.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp56.515.100.000,00 atau 89,30%. Terdapat kenaikan realisasi belanja tak terduga sebesar Rp55.158.300.000 dari tahun 2019.

3. Transfer	2020	2019
	<u>Rp186.894.411.198,00</u>	<u>Rp186.061.395.398,00</u>

Transfer Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp186.894.411.198,00 atau sebesar 99,33%. Belanja transfer tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 5.22 Rincian Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	400.000.000,00	332.377.150,00	83,09	234.285.465,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	187.074.726.200,00	185.899.481.600,00	99,37	185.201.387.800,00
3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	680.439.000,00	662.552.448,00	97,37	625.722.133,00
	Jumlah	188.155.165.200,00	186.894.411.198,00	99,33	186.061.395.398,00



a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2020	2019
	Rp332.377.150,00	Rp234.285.465,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa. Pada Tahun Anggaran 2020 belanja bagi hasil pendapatan dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp332.277.150,00 atau 83,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	200.000.000,00	157.085.650,00	78,54	108.575.937,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	200.000.000,00	175.291.500,00	87,65	125.709.528,00
Jumlah		400.000.000,00	332.377.150,00	83,09	234.285.465,00

b. Transfer Bantuan Keuangan	2020	2019
	Rp185.899.481.600,00	Rp185.201.387.800,00

Transfer Bantuan Keuangan merupakan transfer bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya. Transfer bantuan keuangan ke desa dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada 112 (seratus dua belas) Pemerintahan Lembang di lingkup Kabupaten Tana Toraja yang dianggarkan sebesar Rp187.074.726.200,00 dan terealisasi sebesar Rp185.899.481.600,00 atau mencapai 99,37%.

c. Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2020	2019
	Rp662.552.448,00	Rp625.722.133,00

Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada 7 Partai Politik yang dianggarkan sebesar Rp680.439.000,00 dan terealisasi sebesar 662.552.448,00 atau mencapai 97,37%.

4. Surplus/Defisit	2020	2019
	Rp20.441.958.695,17	Rp25.379.665.450,17

5. Pembiayaan	2020	2019
	Rp36.456.486.410,23	Rp11.172.080.960,06

Pembiayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp86.456.487.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.456.486.410,23 atau mencapai 42,17% dari anggaran. Realisasi pembiayaan daerah tersebut dialokasikan sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Pembiayaan
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penerimaan Pembiayaan	86.456.487.000,00	36.456.486.410,23	42,17	16.172.080.960,06
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto		86.456.487.000,00	36.456.486.410,23	42,17	11.172.080.960,06



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Penerimaan Pembiayaan	2020	2019
	Rp36.456.486.410,23	Rp16.172.080.960,06

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp86.456.487.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.456.486.410,23 atau mencapai 42,17%.

b. Pengeluaran Pembiayaan	2020	2019
	Rp0,00	Rp5.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi pengeluaran pembiayaan.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	2020	2019
	Rp56.898.445.105,40	Rp36.456.486.410,23

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp56.898.445.105,40, rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Rincian Komponen SiLPA

(dalam rupiah)

No.	Komponen SiLPA	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	44.047.092.182,91
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.598.154.300,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.145.616.777,00
4	Kas di BLUD	5.193.352.812,49
5	Kas di Bendahara JKN	1.163.746.043,00
6	Kas di Bendahara Dana BOS	3.750.482.990,00
Total SiLPA LRA		56.898.445.105,40

SiLPA Tahun Anggaran 2020 berupa Kas di Kas Daerah sebesar Rp44.047.092.182,91 terdiri dari Kas yang sudah ditentukan peruntukannya sebesar Rp44.021.958.572,00 dan Kas yang belum ditentukan peruntukannya sebesar Rp25.133.610,91, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.26 Komponen SiLPA Berupa Kas di Kas Daerah TA 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
I.	Kas di Kas Daerah Per 30 Desember 2020	44.047.092.182,91
II.	Dana yang sudah ditentukan peruntukannya	
	1. DAK FISIK	23.950.920.934
	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	17.167.543.800
	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	1.663.909.832
	DAK Bidang Kesehatan dan KB	1.716.370.336
	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	696.414.415
	DAK Bidang Lingkungan Hidup	7.000.000
	DAK Bidang Pertanian	1.207.464.750
	DAK Bidang Pendidikan	226.059.646
	DAK Bidang Irigasi	334.902.826
	DAK Bidang Pariwisata	195.407.329
	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	11.423.000
	DAK Bidang Sanitasi	724.425.000
	2. DAK NON FISIK	18.383.848.873
	BOK Tambahan	2.824.658.921
	BOK	15.040.312.833
	Administrasi Kependudukan	176.757.619
	Kepariwisata	1.140.500
	BOP PAUD	154.500.000
	BOP Kesetaraan	179.200.000
	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	7.279.000
	3. DANA PFK	32.566.200
	4. DAU Tambahan	1.654.622.565,00
	5. Dana di Kas Daerah yang belum ditentukan peruntukannya	25.133.610,91



5.2 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2020 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai saldo anggaran lebih awal pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp36.456.486.410,23 dan Rp16.172.080.960,06.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.456.486.410,23.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp56.898.445.105,40.

4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 Saldo Anggaran Lebih adalah sebesar Rp56.898.445.105,40.

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Posisi Aset per 31 Desember 2020 adalah Aset sebesar Rp3.400.594.423.001,90, Kewajiban sebesar Rp71.539.681.230,00 dan Ekuitas sebesar Rp3.329.054.741.771,90. Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.27 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Aset	3.400.594.423.001,90	3.585.665.701.127,71
	Jumlah Aset	3.400.594.423.001,90	3.585.665.701.127,71
2	Kewajiban	71.539.681.230,00	50.714.445.113,00
3	Ekuitas	3.329.054.741.771,90	3.534.951.256.014,71
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.400.594.423.001,90	3.585.665.701.127,71

1. Aset	2020	2019
	<u>Rp3.400.594.423.001,90</u>	<u>Rp3.585.665.701.127,71</u>

Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.400.594.423.001,90 dan Rp3.585.665.701.127,71 yang terdiri atas:

Tabel 5.28 Rincian Aset

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Aset Lancar	109.657.159.293,70	88.758.751.320,48
2	Investasi Jangka Panjang	41.241.192.808,00	39.709.471.164,00
3	Aset Tetap	3.219.817.777.168,87	3.308.620.484.652,35
4	Aset Lainnya	29.878.293.731,33	148.576.993.990,88
	Jumlah Aset	3.400.594.423.001,90	3.585.665.701.127,71



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Aset Lancar	2020	2019
	Rp109.657.159.293,70	Rp88.758.751.320,48

Jumlah Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp109.657.159.293,70 dan Rp88.758.751.320,48 yang terdiri atas:

Tabel 5.29 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Kas	57.137.568.443,40	36.832.311.496,23
2	Piutang Pajak Daerah	1.161.571.633,31	442.517.231,16
3	Piutang Retribusi Daerah	37.400.380,00	71.120.598,40
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.431.149.511,17	19.481.493.126,17
5	Beban dibayar dimuka	3.020.713.250,00	31.931.308.868,52
6	Persediaan	35.868.756.075,82	31.931.308.868,52
Jumlah Aset Lancar		109.657.159.293,70	88.758.751.320,48

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp57.137.568.443,40 dan Rp36.832.311.496,23 yang terdiri dari:

Tabel 5.30 Rincian Kas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Kas di Kas Daerah	44.047.092.182,91	18.613.378.481,17
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.598.154.300,00	750.973.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.145.616.777,00	1.937.341.075,00
4	Kas di BLUD	5.193.352.812,49	5.679.610.666,06
5	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	1.163.746.043,00	2.176.372.153,00
6	Kas di Bendahara Dana BOS	3.750.482.990,00	7.298.810.535,00
7	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	239.123.338,00	375.825.086,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		57.137.568.443,40	36.832.311.496,23

1) Kas di Kas Daerah	2020	2019
	Rp44.047.092.182,91	Rp18.613.378.481,17

Merupakan Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp44.047.092.182,91 dan Rp18.613.378.481,17 yang berada di rekening Kas Daerah pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Kas Daerah

(dalam rupiah)

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Peruntukan Rekening	Tahun 2020	Tahun 2019
I Bank Sulselbar Cabang Makale					
1)	Rekening Kas Umum Daerah Kab.Tana Toraja	0110-001-000004302-1	DAU, DAK, Dana Bagi Hasil	2.767.644.553,53	52.226.772,19
2)	Rekening Kas Daerah Tk.II Tana Toraja	0110-001-000001581-8	PAD	224.917.907,00	169.781.234,00
3)	Rekening Dana Transfer Pusat dan Propinsi	0110-001-0000015851-1	Transfer Pusat/ Bantuan Provinsi	40.996.829.911,39	17.970.321.813,99
4)	Rekening Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	110-001-000008023-7	Penampungan PFK	32.566.200,00	
II Bank BRI Cabang Makale					
1)	Kas Daerah Kabupaten Tana Toraja	0232-01-000038-30-3	Penerimaan PBB, Jasa Giro/ Deposito	10.353.859,00	406.351.519,00
III Bank BNI Cabang Pembantu Makale					
1)	Pemda Kabupaten Tana Toraja	0258359410	Jasa Giro/ Bunga Deposito	14.664.262,00	14.615.940,00
IV Bank Mandiri Cabang Pembantu Tana Toraja					
1)	Pemda Kabupaten Tana Toraja	152-00-1051861-7	Jasa Giro/ Bunga Deposito	115.489,99	115.489,99
Jumlah Kas Daerah				44.047.092.182,91	18.613.412.769,17



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nomor Rekening	Saldo TA 2019	Penerimaan TA 2020	Pengeluaran TA 2020	Saldo Kas di Kasda
1	110-001-000004302-1	52.226.772,19	900.658.623.538,27	897.943.205.756,93	2.767.644.553,53
2	110-001-000001581-8	169.781.234,00	120.888.330.909,27	120.833.194.236,27	224.917.907,00
3	110-001-000008023-7	0,00	19.898.378.588,00	19.865.812.388,00	32.566.200,00
4	110-001-00015851-1	17.970.321.813,99	218.548.975.410,00	195.522.467.312,60	40.996.829.911,39
5	0258359410	14.615.940,00	48.322,00	0,00	14.664.262,00
6	0232-01-000038-30-3	406.351.519,00	4.802.808,00	400.800.468,00	10.353.859,00
7	152-00-1051861-7	115.489,99	0,00	0,00	115.489,99
	Jumlah	18.613.412.769,17	1.259.999.159.575,54	1.234.565.480.161,80	44.047.092.182,91

Terdapat koreksi saldo awal Kas di Kas Daerah sebesar Rp34.288,00 karena adanya kas di rekening Kas Daerah yang tersisa dari pembulatan gaji pada beberapa OPD di tahun anggaran 2019.

2) Kas di Bendahara	2020	2019
Penerimaan	Rp1.598.154.300,00	Rp750.973.500,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa pungutan pendapatan daerah yang masih berada di Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.598.154.300,00.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian; Badan Pendapatan Daerah. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	Nama O P D	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Kesehatan	0,00	7.755.000,00
	- Puskesmas Makale Utara	0,00	170.000,00
	- Puskesmas Madandan	0,00	1.202.000,00
	- Puskesmas Rantetayo	0,00	659.000,00
	- Puskesmas Kurra	0,00	435.000,00
	- Puskesmas Rembon	0,00	262.000,00
	- Puskesmas Ulusalu	0,00	674.000,00
	- Puskesmas Ratte	0,00	338.000,00
	- Puskesmas Buakayu	0,00	320.000,00
	- Puskesmas Buntu	0,00	351.000,00
	- Puskesmas Buntu Limbong	0,00	710.000,00
	- Puskesmas Ge'tengan	0,00	1.560.000,00
	- Puskesmas Kondoran	0,00	412.500,00
	- Puskesmas Batusura'	0,00	661.500,00
2	Dinas Pariwisata	104.200.000,00	371.641.000,00
	- Obyek Wisata Burake	104.200.000,00	354.217.000,00
	- Obyek Wisata Pango-Pango	0,00	1.154.000,00
	- Obyek Wisata Tampang Allo	0,00	1.108.000,00
	- Obyek Wisata Tilanga	0,00	4.140.000,00
	- Obyek Wisata Kambira	0,00	1.352.000,00
	- Obyek Wisata Karuaya Bebo	0,00	88.000,00
	- Sewa Lods Tempat Pasar Seni	0,00	1.472.000,00
	- Obyek Wisata Lemo	0,00	6.400.000,00
	- Obyek Wisata Suaya	0,00	1.710.000,00
3	Dinas Pertanian	1.250.000,00	60.000,00
	- Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1.250.000,00	60.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	1.492.704.300,00	371.517.500,00
	a. Pajak Rumah Makan :	12.842.000,00	6.688.000,00
	- UPTD Wilayah Makale	655.000,00	45.000,00
	- UPTD Wilayah Mengkendek	162.000,00	358.000,00
	- UPTD Wilayah Saluputti	870.000,00	265.000,00
	- Rumah Makan Kuliner Malam	6.020.000,00	6.020.000,00
	- Kuliner Siang 2020	5.135.000,00	0,00
	b. Retribusi Pasar :	26.472.000,00	25.996.000,00
	- UPTD Wilayah Makale	10.174.000,00	10.080.000,00
	- UPTD Wilayah Mengkendek	7.592.000,00	8.440.000,00
	- UPTD Wilayah Saluputti	7.852.000,00	7.476.000,00
	- Pasar Buakayu	854.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama O P D	Tahun 2020	Tahun 2019
	c. Retribusi Pasar Hewan :	0,00	397.500,00
	- UPTD Wilayah Saluputti	0,00	397.500,00
	d. Retribusi MCK :	444.000,00	1.001.000,00
	- UPTD Wilayah Mengkendek	244.000,00	1.001.000,00
	- Pasar Buakayu	200.000,00	0,00
	e. Retribusi Rumah Potong Hewan :	905.150.000,00	337.435.000,00
	- Kecamatan Makale	171.200.000,00	29.600.000,00
	- Kecamatan Makale Utara	57.575.000,00	0,00
	- Kecamatan Makale Selatan	102.550.000,00	19.600.000,00
	- Kecamatan Sangalla	0,00	525.000,00
	- Kecamatan Sangalla Utara	78.675.000,00	55.160.000,00
	- Kecamatan Sangalla Selatan	6.850.000,00	0,00
	- Kecamatan Mengkendek	65.275.000,00	48.505.000,00
	- Kecamatan Gandang Batu Sillanan	111.650.000,00	27.325.000,00
	- Kecamatan Rantetayo	31.700.000,00	2.785.000,00
	- Kecamatan Rembon	46.775.000,00	19.025.000,00
	- Kecamatan Saluputti	7.500.000,00	76.025.000,00
	- Kecamatan Bittuang	10.350.000,00	3.650.000,00
	- Kecamatan Kurra	33.675.000,00	1.500.000,00
	- Kecamatan Bonggakaradeng	32.100.000,00	48.235.000,00
	- Kecamatan Malimbong Balepe	17.075.000,00	0,00
	- Kecamatan Rano	225.000,00	0,00
	- Kecamatan Masanda	53.750.000,00	0,00
	- Kecamatan Simbuang	63.550.000,00	550.000,00
	- Kecamatan Mappak	14.675.000,00	4.950.000,00
	f. Tempat Rekreasi	503.463.500,00	0,00
	- Objek Wisata Pango-Pango	4.780.000,00	0,00
	- Objek Wisata Burake	488.445.000,00	0,00
	- Objek Wisata Karuaya Bebo	84.000,00	0,00
	- Objek Wisata Tilanga	4.002.500,00	0,00
	- Objek Wisata Lemo	5.816.000,00	0,00
	- Objek Wisata Suaya	320.000,00	0,00
	- Objek Wisata Kambira	16.000,00	0,00
	g. Pajak Mineral	44.332.800,00	0,00
	- Retribusi Pasir dan batu 1,8 M ³	1.058.400,00	0,00
	- Retribusi Batu Pecah 3.1 - 15 Cm 1,8M ³	300.000,00	0,00
	- Retribusi batu Gunung 1,8 M ³	10.382.400,00	0,00
	- Retribusi Pasir 1,8 M ³	6.822.000,00	0,00
	- Retribusi Pasir 3 M ³	25.770.000,00	0,00
	Jumlah	1.598.154.300,00	750.973.500,00

No	Nama O P D	Tahun 2020	Nomor STS	Tanggal Penyetoran ke Kasda
1	Dinas Pariwisata	104.200.000,00	-	-
	- Obyek Wisata Burake	104.200.000,00	-	-
2	Dinas Pertanian	1.250.000,00	-	-
	- Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1.250.000,00	200	28-01-2021
3	Badan Pendapatan Daerah	1.492.704.300,00	-	-
	a. Pajak Rumah Makan :	12.842.000,00	-	-
	- UPTD Wilayah Makale	655.000,00	0187	26-01-2021
	- UPTD Wilayah Mengkendek	162.000,00	0187, 0206	26-01-2021, 29-01-2021
	- UPTD Wilayah Saluputti	870.000,00	015	05-01-2021
	- Rumah Makan Kuliner Malam	6.020.000,00	-	-
	- Kuliner Siang 2020	5.135.000,00	0157, 0969	21-01-2021, 12-4-2021
	b. Retribusi Pasar :	26.472.000,00	-	-
	- UPTD Wilayah Makale	10.174.000,00	0186	26-01-2021
	- UPTD Wilayah Mengkendek	7.592.000,00	0186, 0205	26-01-2021, 29-01-2021
	- UPTD Wilayah Saluputti	7.852.000,00	0014	05-01-2021
	- Pasar Buakayu	854.000,00	-	-
	d. Retribusi MCK :	444.000,00	-	-
	- UPTD Wilayah Mengkendek	244.000,00	0188, 0207	26-01-2021, 29-01-2021
	- Pasar Buakayu	200.000,00	-	-
	e. Retribusi Rumah Potong Hewan :	905.150.000,00	-	-
	- Kecamatan Makale	171.200.000,00	0032, 0314, 0348, 0358, 0472	07-01-2021, 02-02-2021, 09-02-2021, 10-02-2021, 24-02-2021
	- Kecamatan Makale Utara	57.575.000,00	0037	11-01-2021
	- Kecamatan Makale Selatan	102.550.000,00	0032, 0194, 0208, 0348	7-01-2021, 27-01-2021, 29-01-2021, 9-02-2021
	- Kecamatan Sangalla Utara	78.675.000,00	0135, 0185, 0961, 1052	19-01-2021, 26-01-2021, 12-04-2021, 21-04-2021
	- Kecamatan Sangalla Selatan	6.850.000,00	0038	12-1-2021



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama O P D	Tahun 2020	Nomor STS	Tanggal Penyetoran ke Kasda
	- Kecamatan Mengkendek	65.275.000,00	0193	27-1-2021
	- Kecamatan Gandang Batu Sillanan	111.650.000,00	0035, 0175, 0208, 0034, 0036	8-1-2021, 25-1-2021, 26-1-2021, 29-1-2021, 2-1-2021
	- Kecamatan Rantetayo	31.700.000,00	0135, 0372	19-1-2021, 11-2-2021
	- Kecamatan Rembon	46.775.000,00	0171	25-1-2021
	- Kecamatan Saluputti	7.500.000,00	0038	12-01-2021
	- Kecamatan Bittuang	10.350.000,00	0037	11-1-2021
	- Kecamatan Kurra	33.675.000,00	0003, 0171	4-1-2021, 25-1-2021
	- Kecamatan Bongkaradeng	32.100.000,00	0171, 0704, 0971	25-1-2021, 17-03-2021, 12-04-2021
	- Kecamatan Malimbong Balepe	17.075.000,00	0056	21-1-2021
	- Kecamatan Rano	225.000,00	0037	11-1-2021
	- Kecamatan Masanda	53.750.000,00	0403	17-2-2021
	- Kecamatan Simbuang	63.550.000,00	0003, 0038	4-1-2021, 12-1-2021
	- Kecamatan Mappak	14.675.000,00	0185	26-1-2021
	f. Tempat Rekreasi	503.463.500,00		
	- Objek Wisata Pango-Pango	4.780.000,00	0158, 0347	21-1-2021, 9-2-2021
	- Objek Wisata Burake	488.445.000,00	0988	14-04-2021
	- Objek Wisata Karuaya Bebo	84.000,00	0176	25-1-2021
	- Objek Wisata Tilanga	4.002.500,00	0172	25-1-2021
	- Objek Wisata Lemo	5.816.000,00	0204, 0315	29-1-2021, 4-2-2021
	- Objek Wisata Suaya	320.000,00	0315, 1163	4-2-2021, 30-4-2021
	- Objek Wisata Kambira	16.000,00	0315	4-2-2021
	g. Pajak Mineral	44.332.800,00		
	- Retribusi Pasir dan batu 1,8 M ³	1.058.400,00	0374, 0962	11-2-2021, 12-04-2021
	- Retribusi Batu Pecah 3.1 - 15 Cm 1,8M ³	300.000,00	0374, 0962	11-2-2021, 12-04-2021
	- Retribusi batu Gunung 1,8 M ³	10.382.400,00	0031, 0352, 0374	7-01-2021, 9-02-2021, 11-2-2021
	- Retribusi Pasir 1,8 M ³	6.822.000,00	0374, 0962	11-2-2021, 12-04-2021
	- Retribusi Pasir 3 M ³	25.770.000,00	0374	11-2-2021
	Jumlah	1.598.154.300,00		

Tabel 5.33 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah

(dalam rupiah)

No	Nama O P D	Jumlah Karcis	Nilai Satuan	Jumlah Saldo Kas (Rp)
1	UPTD Wilayah Makale :			
	- Retribusi Pasar	5.087	2.000	10.174.000,00
	- Pajak Rumah Makan (PP1)	16	10.000	160.000,00
	- Pajak Rumah Makan (PP1)	33	15.000	495.000,00
2	UPTD Wilayah Mengkendek :			
	- Retribusi Pasar	3.796	2.000	7.592.000,00
	- Pajak Rumah Makan (PP1)	81	2.000	162.000,00
	- Retribusi MCK	122	2.000	244.000,00
3	UPTD Wilayah Saluputti :			
	- Retribusi Pasar	3926	2.000	7.852.000,00
	- Pajak Rumah Makan (PP1)	174	5.000	870.000,00
4	Pasar Buakayu :			
	- Retribusi Pasar	427	2.000	854.000,00
	- Retribusi MCK	100	2.000	200.000,00
5	Rumah Makan Kuliner Malam	2	5.000	10.000,00
		592	10.000	5.920.000,00
		6	15.000	90.000,00
6	Rumah Makan Kuliner Siang	385	5.000	1.925.000,00
		247	10.000	2.470.000,00
		24	15.000	360.000,00
		19	20.000	380.000,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan :			
	- Kecamatan Makale :			



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama O P D	Jumlah Karcis	Nilai Satuan	Jumlah Saldo Kas (Rp)
	Kerbau	128	250.000	32.000.000,00
	Babi	1202	75.000	90.150.000,00
	P/A	654	75.000	49.050.000,00
	- Kecamatan Makale Utara :			
	Kerbau	56	250.000	14.000.000,00
	Babi	402	75.000	30.150.000,00
	P/A	179	75.000	13.425.000,00
	- Kecamatan Makale Selatan :			
	Kerbau	94	250.000	23.500.000,00
	Babi	761	75.000	57.075.000,00
	P/A	293	75.000	21.975.000,00
	- Kecamatan Sangalla Utara :			
	Kerbau	66	250.000	16.500.000,00
	Babi	592	75.000	44.400.000,00
	P/A	237	75.000	17.775.000,00
	- Kecamatan Sangalla Selatan :			
	Kerbau	7	250.000	1.750.000,00
	Babi	37	75.000	2.775.000,00
	P/A	31	75.000	2.325.000,00
	- Kecamatan Mengkendek :			
	Kerbau	10	250.000	2.500.000,00
	Babi	454	75.000	34.050.000,00
	P/A	50	30.000	1.500.000,00
	Kambing	4	75.000	300.000,00
	P/A	359	75.000	26.925.000,00
	- Kecamatan Gandang Batu Sillanan :			
	Kerbau	86	250.000	21.500.000,00
	Babi	556	75.000	41.700.000,00
	Sapi	5	150.000	750.000,00
	P/A	636	75.000	47.700.000,00
	- Kecamatan Rantetayo :			
	Kerbau	47	250.000	11.750.000,00
	Babi	186	75.000	13.950.000,00
	P/A	80	75.000	6.000.000,00
	- Kecamatan Rembon :			
	Kerbau	44	250.000	11.000.000,00
	Babi	252	75.000	18.900.000,00
	P/A	225	75.000	16.875.000,00
	- Kecamatan Saluputti :			
	Kerbau	12	250.000	3.000.000,00
	Babi	49	75.000	3.675.000,00
	P/A	11	75.000	825.000,00
	- Kecamatan Bittuang :			
	Kerbau	12	250.000	3.000.000,00
	Babi	75	75.000	5.625.000,00
	P/A	23	75.000	1.725.000,00
	- Kecamatan Kurra :			
	Kerbau	51	250.000	12.750.000,00
	Babi	239	75.000	17.925.000,00
	P/A	40	75.000	3.000.000,00
	- Kecamatan Bonggakaradeng :			
	Kerbau	18	250.000	4.500.000,00
	Babi	224	75.000	16.800.000,00
	Sapi	2	150.000	300.000,00
	P/A	140	75.000	10.500.000,00
	- Kecamatan Malimbong Balepe :			
	Kerbau	20	250.000	5.000.000,00
	Babi	89	75.000	6.675.000,00
	P/A	72	75.000	5.400.000,00
	- Kecamatan Rano :			
	Babi	1	75.000	75.000,00
	Sapi	1	150.000	150.000,00
	- Kecamatan Masanda :			
	Kerbau	53	250.000	13.250.000,00
	Babi	368	75.000	27.600.000,00
	P/A	172	75.000	12.900.000,00
	- Kecamatan Simbuang :			
	Kerbau	70	250.000	17.500.000,00
	Babi	614	75.000	46.050.000,00
	- Kecamatan Mappak :			



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama O P D	Jumlah Karcis	Nilai Satuan	Jumlah Saldo Kas (Rp)
	Kerbau	11	250.000	2.750.000,00
	Babi	159	75.000	11.925.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi :			
	- Pango-Pango :			
	Retribusi Wisnus Dewasa (Siang/Pagi)	2	10.000	20.000,00
	Retribusi Wisnus Anak (pagi)	100	5.000	500.000,00
	Retribusi Wisnus Dewasa (Malam)	260	15.000	3.900.000,00
	Home Stay	1	360.000	360.000,00
	- Burake :			
	Retribusi Wisman	163	20.000	3.260.000,00
	Retribusi Wisnus Dewasa (Siang)	32.838	10.000	328.380.000,00
	Retribusi Wisnus Anak (Pagi)	1.865	5.000	9.325.000,00
	Retribusi Wisnus Dewasa (Malam/Sore)	1.236	15.000	18.540.000,00
	Retribusi Wisnus Anak (Sore)	152	7.500	1.140.000,00
	Kaca	2.540	50.000	127.000.000,00
	Toilet	400	2.000	800.000,00
	- Karuaya Bebo :			
	Wisatawan Mancanegara	9	20.000	72.000,00
	Wisatawan Nusantara Umum	3	10.000	12.000,00
	- Tilanga :			
	Wisatawan Mancanegara	123	20.000	1.230.000,00
	Wisatawan Nusantara Umum	499	10.000	2.495.000,00
	Pelajar/Mahasiswa	111	5.000	277.500,00
	- Lemo :			
	Wisatawan Mancanegara	477	20.000	3.816.000,00
	Wisatawan Nusantara Umum	500	10.000	2.000.000,00
	- Suaya :			
	Wisatawan Mancanegara	32	20.000	320.000,00
	- Kambira :			
	Wisatawan Mancanegara	2	20.000	16.000,00
9	Pajak Mineral dengan Karcis :			
	- Retribusi Pasir dan batu 1,8 M ³	84	12.600	1.058.400,00
	- Retribusi Batu Pecah 3.1 - 15 Cm 1,8M ³	20	15.000	300.000,00
	- Retribusi batu Gunung 1,8 M ³	721	14.400	10.382.400,00
	- Retribusi Pasir 1,8 M ³	379	18.000	6.822.000,00
	- Retribusi Pasir 3 M ³	859	30.000	25.770.000,00
	Jumlah			1.492.704.300,00

Atas saldo kas di Bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.598.154.300,00 telah disetor ke kas daerah pada tahun 2021 sebesar Rp908.472.100,00 dan sisa yang belum disetor sebesar Rp689.682.200,00. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

3) Kas di Bendahara	2020	2019
Pengeluaran	Rp1.145.616.777,00	Rp1.937.341.075,00

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.145.616.777,00 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.937.341.075,00 merupakan saldo uang persediaan yang harus dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp1.145.616.777,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Nama O P D	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan	93.540.841,00	1.208.141,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	56.958,00
3	Badan Penanggulangan Bencana	6.208.860,00	62.154.600,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	120,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	24.777,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.660.200,00	0,00
7	Dinas Kepemudaan Olah Raga	0,00	99.233.000,00
8	Sekretariat Daerah	17.076,00	275.013.310,00
9	Kecamatan Makale	26.106.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama O P D	Tahun 2020	Tahun 2019
10	Kecamatan Malimbong Balepe	0,00	(640.000,00)
11	Kecamatan Simbuang	909.500,00	0,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	918.363.300,00	1.036.408.714,00
13	Badan Pendapatan Daerah	97.811.000,00	463.881.455,00
Jumlah		1.145.616.777,00	1.937.341.075,00

No	Nama O P D	Tahun 2020	Nomor STS	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Sisa yang belum Disetor
1	Dinas Pendidikan	93.540.841,00	51	15-01-2021	93.540.841,00	0,00
2	Badan Penanggulangan Bencana	6.208.860,00	179, 215	26-01-2021	6.208.860,00	0,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.660.200,00	362	10-02-2021	2.660.200,00	0,00
4	Sekretariat Daerah	17.076,00	138	20-01-2021	17.076,00	0,00
5	Kecamatan Makale	26.106.000,00	2, 6	04-01-2021	26.106.000,00	0,00
6	Kecamatan Simbuang	909.500,00	670	08-03-2021	909.500,00	0,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	918.363.300,00	'33,36,128,129,130,'4928	7-1-2021, 11-1-2021, 19-1-2021, 7-12-2020	918.363.300,00	0,00
8	Badan Pendapatan Daerah	97.811.000,00	1483	17-5-2021	30.000.000,00	67.811.000,00
Jumlah		1.145.616.777,00			1.077.805.777,00	67.811.000,00

Atas saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.145.616.777,00 telah disetor ke kas daerah pada tahun 2021 sebesar Rp1.077.805.777,00 dan sisa yang belum disetor sebesar Rp67.811.000,00. Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

4) Kas di BLUD	2020	2019
	<u>Rp5.193.352.812,49</u>	<u>Rp5.679.610.666,06</u>

Kas di BLUD sebesar Rp5.193.352.812,49 merupakan sisa kas pada RSUD Lakipadada Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari:

Tabel 5.35 Rincian Kas di BLUD
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nomor Rekening	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Kas di Bendahara Penerimaan (BRI)		21.389.941,75	12.862.814,18
2	Kas di Bendahara Pengeluaran		23.561.350,70	60.151.280,71
3	Bendahara Penerimaan (BRI)	00000232-01-000729-30-2	1.503.498.628,84	2.006.062.078,37
4	Bendahara Pengeluaran (BRI)	023201000738306	27.919.344,00	2.800.409,60
5	Deposito (BRI)	0232-01-004542-40-2	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
6	Giro Tdk Hit BBB Pemerintah (BNI)	278429249	27.000.685,00	9.000.685,00
7	Assesmen BNN (BRI)	23201000730303	13.232.364,20	13.203.613,20
8	Giro (BPD Sulselbar)	110-002-000019544-9	76.750.498,00	75.529.785,00
Jumlah			5.193.352.812,49	5.679.610.666,06

5) Kas di Bendahara JKN	2020	2019
	<u>Rp1.163.746.043,00</u>	<u>Rp2.176.372.153,00</u>

Kas di Bendahara Kapitasi JKN adalah pos untuk menampung sisa dana kapitasi yang belum dibelanjakan oleh Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipergunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat saldo kas di Bendahara FKTP sebesar Rp1.163.746.043,00. Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN sebagai berikut:



Tabel 5.36 Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN

(dalam rupiah)

No.	Nama FKTP	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Puskesmas Bittuang	31.288.275,00	216.339.900,00
2	Puskesmas Buakayu	3.966.067,00	96.887.592,00
3	Puskesmas Buntu	46.643.651,00	107.323.434,00
4	Puskesmas Buntu Limbong	43.165.528,00	94.138.805,00
5	Puskesmas Ge'tengan	23.162.175,00	89.407.986,00
6	Puskesmas Kondoran	31.883.936,00	47.982.194,00
7	Puskesmas Kondodewata	89.810.632,00	86.579.432,00
8	Puskesmas Kurra	2.619.297,00	57.338.870,00
9	Puskesmas Lekke	28.653.663,00	103.004.194,00
10	Puskesmas Rembon	19.976.176,00	6.603.105,00
11	Puskesmas Ratte	87.914.099,00	208.092.157,00
12	Puskesmas Rantetayo	27.257.366,00	75.540.446,00
13	Puskesmas Rantealang	21.522.715,00	62.414.359,00
14	Puskesmas Rano	104.177.743,00	170.666.143,00
15	Puskesmas Madandan	163.791,00	4.766.294,00
16	Puskesmas Makale	21.538.783,00	223.253.179,00
17	Puskesmas Sandabilik	250.447.876,00	184.141.853,00
18	Puskesmas Tumbang Datu	32.023.102,00	15.293.446,00
19	Puskesmas Batusura	190.845.179,00	210.864.390,00
20	Puskesmas Ulusalu	52.877.392,00	75.960.523,00
21	Puskesmas Makale Utara	53.808.597,00	39.773.851,00
Jumlah		1.163.746.043,00	2.176.372.153,00

Rincian Kas di Bendahara JKN dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

6) Kas di Bendahara Dana BOS	2020	2019
	<u>Rp3.750.482.990,00</u>	<u>Rp7.298.810.535,00</u>

Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp3.750.482.992,00. Kas di Bendahara Dana BOS adalah pos untuk menampung sisa dana BOS pada masing-masing sekolah di Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipergunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat saldo kas di Bendahara BOS sebesar Rp3.750.482.990,00 yang terdiri dari sisa dana BOS pada SD dan SMP Negeri serta SD dan SMP Swasta di wilayah Kabupaten Tana Toraja, rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37 Rincian Kas di Bendahara Dana BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	SD NEGERI	2.870.951.670,00	5.047.719.467,00
2	SMP NEGERI	879.531.320,00	2.228.259.049,00
3	SD Swasta	0,00	4.973.864,00
4	SMP Swasta	0,00	17.858.155,00
Jumlah Dana BOS		3.750.482.990,00	7.298.810.535,00

Rincian Kas di Bendahara Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

7) Kas Lainnya	2020	2019
	<u>Rp239.123.338,00</u>	<u>Rp375.825.086,00</u>

Kas lainnya yaitu Pajak Pusat yang masih belum disetorkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp239.123.338,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38 Rincian Saldo Pajak

(dalam rupiah)

No.	Nama FKTP	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan	17.587.177,00	35.449.818,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	13.525.361,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.878.011,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.600.000,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana	130.850,00	22.780.114,00
6	Sekretariat Daerah	125.531.532,00	288.134.088,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama FKTP	Tahun 2020	Tahun 2019
7	Kecamatan Sangalla Utara	1.137.773,00	0,00
8	Kecamatan Saluputti	0,00	1.207.000,00
9	Kecamatan Kurra	12.268.419,00	583.720,00
10	Kecamatan Bonggakaradeng		899.985,00
11	Kecamatan Masanda	2.083.473,00	0,00
12	Kecamatan Mappak	0,00	1.550.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	11.695.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.906.103,00	0,00
Jumlah		239.123.338,00	375.825.086,00

No.	Nama FKTP	Tahun 2020	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Sisa yang belum disetor
1	Dinas Pendidikan	17.587.177,00	19-2-2021	17.587.177,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.878.011,00	12-1-2021	23.878.011,00	0,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.600.000,00	6-01-2021	2.600.000,00	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana	130.850,00	25-1-2021	130.850,00	0,00
5	Sekretariat Daerah	125.531.532,00	29-1-2021	125.531.532,00	0,00
6	Kecamatan Sangalla Utara	1.137.773,00		1.137.773,00	0,00
7	Kecamatan Kurra	12.268.419,00			12.268.419,00
8	Kecamatan Masanda	2.083.473,00	27-1-2020	2.083.473,00	0,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.906.103,00	15-2-2021	53.906.103,00	0,00
Jumlah		239.123.338,00		226.854.919,00	12.268.419,00

Saldo Pajak telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp226.854.919,00 dan masih terdapat sisa yang belum disetor Kecamatan Kurra sebesar Rp12.268.419,00.

Pada TA 2020 terdapat pengembalian dana atas program Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan (PeLEK) sebesar Rp4.069.000.000,00. Adapun senilai Rp4.000.000.000,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun berjalan. Akan tetapi senilai Rp69.000.000,00 diketahui Rp9.000.000,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 3 Mei 2021 dan Rp60.000.000,00 tidak dapat dijelaskan penggunaannya oleh bendahara Satgas Covid-19 serta tidak dapat ditunjukkan fisik uang tersebut. Selain itu terdapat juga pengembalian dana PeLEK yang telah disetor koordinator kolektor pengembalian dana PeLEK ke Bendahara Satgas Covid-19 sebesar Rp119.775.250,00 akan tetapi tidak ada fisik uang maupun pertanggungjawabannya. Senilai Rp179.775.250,00 belum dilakukan proses penuntutan ganti rugi. Berdasarkan data tersebut, maka pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan melakukan proses penentuan ganti kerugian daerah serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Piutang Pajak	2020	2019
	Rp1.161.571.633,31	Rp442.517.231,16

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat saldo piutang pajak sebesar Rp1.161.571.633,31 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.39 Rincian Saldo Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Piutang Pajak Hotel	277.775.255,00	254.500.889,00
2	Piutang Pajak Restoran	173.246.549,00	161.653.580,00
3	Piutang Pajak Hiburan	4.498.000,00	2.627.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	0,00	500,00
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.015.426.193,00	292.775.278,00
6	Penyisihan Piutang Pajak	(309.374.363,69)	(269.040.015,84)
Jumlah Piutang Pajak		1.161.571.633,31	442.517.231,16

Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

9) Piutang Retribusi	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Rp37.400.380,00	Rp71.120.598,40

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.400.380,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Saldo Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	231.947.775,00	268.539.275,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.688.640,00	4.688.640,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	106.945.000,00	106.945.000,00
4	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	140.705.000,00	140.705.000,00
5	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi & Olah raga	14.999.000,00	14.999.000,00
6	Piutang Uang Kuliah Akper	239.250.000,00	239.250.000,00
7	Penyisihan Piutang Retribusi	(701.135.035,00)	(704.006.316,60)
Jumlah Piutang Retribusi		37.400.380,00	71.120.598,40

Rincian piutang retribusi daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

10) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Rp12.431.149.511,17	Rp19.481.493.126,17

Saldo Piutang Lainnya merupakan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.431.149.511,17 yang terdiri dari:

Tabel 5.41 Rincian Saldo Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Piutang Dom Kendaraan Dinas Roda 2	990.500,00	990.500,00
2	Piutang TP/TGR	481.926.894,17	484.426.894,17
3	Piutang BLUD	11.948.232.117,00	18.996.075.732,00
Jumlah Piutang Lainnya		12.431.149.511,17	19.481.493.126,17

(a) Piutang Dom Kendaraan Roda 2	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Rp990.500,00	Rp990.500,00

Piutang Dom Kendaraan Dinas Roda 2 sebesar Rp990.500,00 yaitu dom kendaraan dinas roda 2 yang di dom oleh Pegawai Pemerintah Daerah Tana Toraja (6 orang) dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke Kas Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.42 Rincian Saldo Piutang Dom Kendaraan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Nama Pembeli	Nomor Polisi	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Drs. M. Linggiallo	DD 2156 U	120.000,00	120.000,00
2	Drs. Slamet Darmanto	DD 2345 U	150.000,00	150.000,00
3	Enos Karaeng	DD 2149 U	220.000,00	220.000,00
4	F.S.S. Paressa	DD 2191 U	275.000,00	275.000,00



No.	Nama Pembeli	Nomor Polisi	Tahun 2020	Tahun 2019
5	Piter Patabang	DD 4008 U	50.000,00	50.000,00
6	P. Tandi Mallisa	DD 2144 U	175.500,00	175.500,00
Jumlah			990.500,00	990.500,00

Rincian Piutang Dom kendaraan dinas dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

(b) Piutang TP/TGR	2020	2019
	<u>Rp481.926.894,17</u>	<u>Rp484.426.894,17</u>

Saldo Piutang TPTGR per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp481.926.894,17 dan Rp484.426.894,17. Rincian piutang TPTGR dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

(c) Piutang BLUD	2020	2019
	<u>Rp11.948.232.117,00</u>	<u>Rp18.996.075.732,00</u>

Piutang Usaha BLUD pada RSUD Lakipadada per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp11.948.232.117,00 dan Rp18.996.075.732,00. Rincian piutang usaha BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 8**. Piutang Usaha BLUD ini merupakan piutang Pembayaran pengajuan klaim ke BPJS atas jasa yang telah di berikan RSUD Lakipadada pada tahun 2020.

11) Beban Dibayar Di Muka	2020	2019
	<u>Rp3.020.713.250,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Beban Dibayar di Muka Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.020.713.250,00 dan Rp0,00.

12) Persediaan	2020	2019
	<u>Rp35.868.756.075,82</u>	<u>Rp31.931.308.868,52</u>

Persediaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp35.868.756.075,82 dan Rp31.931.308.868,52 yang terdiri atas:

Tabel 5.43 Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
I	Persediaan Bahan Pakai Habis	448.472.150,00	587.575.148,00
1	Persediaan, Materai & Benda Pos Lainnya	0,00	1.008.000,00
2	Persediaan Alat Tulis Kantor	197.657.240,00	175.823.258,00
3	Persediaan Barang Cetak	250.814.910,00	410.743.890,00
II	Persediaan Bahan/Material	7.245.838.225,82	8.186.814.135,52
1	Persediaan Obat-Obatan	5.278.794.033,32	6.513.738.934,69
2	Persediaan untuk Pemeliharaan	65.655.965,00	0,00
3	Persediaan Pakan Ikan/Ternak	0,00	63.064.780,00
4	Persediaan Barang Konsumsi	5.232.016,50	0,00
5	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.894.992.211,00	0,00
6	Persediaan Pita Cukai dan Leges	1.164.000,00	0,00
7	Persediaan Alat Kesehatan	0,00	1.602.858.793,00
8	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0,00	3.792.952,83
9	Persediaan Bahan Pemeliharaan Gedung	0,00	3.358.675,00
III	Persediaan Barang Lainnya	28.174.445.700,00	23.156.919.585,00
1	Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Masyarakat	28.174.445.700,00	23.132.716.525,00
2	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	21.207.560,00



No	Jenis Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
3	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	2.995.500,00
Jumlah Persediaan		35.868.756.075,82	31.931.308.868,52

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Metode penilaian persediaan menggunakan inventarisasi fisik (*Stock Opname*). Rincian persediaan per-OPD selengkapnya pada **Lampiran 9**.

Sistem pencatatan persediaan pada Kabupaten Tana Toraja menggunakan perpetual dan periodik. Metode perpetual digunakan untuk pencatatan persediaan obat dan barang yang akan diserahkan. Sedangkan metode periodik digunakan untuk mencatat persediaan barang habis pakai, bahan material kecuali obat dan Persediaan barang lainnya kecuali barang yang akan diberikan, kepada pihak ketiga.

b. Investasi Jangka Panjang	2020	2019
	Rp41.241.192.808,00	Rp39.709.471.164,00

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp41.241.192.808,00 dan Rp39.709.471.164,00 terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
I.	Investasi Non Permanen	4.238.013.500,00	4.238.013.500,00
II.	Investasi Permanen	37.003.179.308,00	35.471.457.664,00
Jumlah		41.241.192.808,00	39.709.471.164,00

1) Investasi Non Permanen	2020	2019
	Rp4.238.013.500,00	Rp4.238.013.500,00

(a) Dana bergulir	2020	2019
	Rp1.653.607.612,00	Rp1.656.607.612,00

Dana Bergulir sebesar Rp1.653.607.612,00 merupakan dana bergulir pada delapan OPD dengan rincian umum jatuh tempo, aging schedule, serta *Net Realizable Value*. Pengurangan Dana Bergulir di tahun 2020 sebesar Rp3.000.000,00 penyetoran dari Dinas Koperasi. Rincian Investasi Non Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

(b) Penyisihan Dana bergulir	2020	2019
	(Rp1.653.607.612,00)	(Rp1.656.607.612,00)

Investasi Non permanen Dana Bergulir tersebut telah disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dengan melakukan penyesuaian membentuk akun dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

(c) Investasi Non Permanen Lainnya	2020	2019
	Rp4.238.013.500,00	Rp4.238.013.500,00

Nilai investasi non permanen lainnya berupa investasi kepada kelompok ternak per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.238.013.500,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 11**.



2) Investasi Permanen	2020	2019
	Rp37.003.179.308,00	Rp35.471.457.664,00

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.003.179.308,00 merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada PT Bank Sulselbar, BUMD dan PDAM Kabupaten Tana Toraja, dengan uraian sebagai berikut:

(a) Total Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2020 adalah Rp26.568.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.586.000.000,00. Penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar dicatat berdasarkan metode biaya (cost method) dengan persentase kepemilikan sebesar 1,97% sesuai dengan Laporan Auditor Independen Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, Nomor 00009/3.0266/AU.1/07/0408-1/1/II/2020.

Investasi dicatat sebesar harga perolehannya dan deviden yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan deviden yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktivitas dan rentabilitas investasi.

(b) Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Tana Toraja disajikan sebesar Rp10.417.179.308,00

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar 100%. Penilaian investasi permanen pada PDAM Kabupaten Tana Toraja menggunakan metode ekuitas (equity method) yaitu sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba/rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 (audited) diketahui bahwa nilai ekuitas PDAM Tana Toraja per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.417.179.308,00.

Tabel 5.45 Rincian Penyertaan Modal pada PDAM

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2020	8.885.457.664,00
Penambahan Modal Hibah	1.277.082.330,00
Laba (Rugi) Tahun 2019	254.639.314,00
Jumlah	10.417.179.308,00

(c) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tana Toraja disajikan sebesar Rp0,00

Penyajian nilai tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 21/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penyesuaian Nilai Penyertaan Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Aset Perusahaan Daerah Kabupaten Tana Toraja, yang menetapkan perubahan metode penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari metode biaya ke metode ekuitas.

Penerapan nilai investasi pada Perusda dengan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp0,00 dengan pertimbangan bahwa Perusda mengalami kerugian terus menerus dan sudah tidak layak melakukan aktivitas operasional. Sampai dengan penyusunan laporan keuangan per 31 desember 2020 status Perusda



mati suri, sambil menunggu Peraturan Bupati tentang pembubaran Perusahaan Daerah. Penetapan aset Perusda baik pemanfaatan dan penatausahannya telah diserahkan kepada BPKAD sejak tahun 2014.

c. Aset Tetap	2020	2019
	Rp3.219.817.777.168,87	Rp3.308.620.484.652,35

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.219.817.777.168,87 dan Rp3.308.620.484.652,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	1.697.974.807.085,00	0,00	1.697.974.807.085,00
2.	Peralatan dan Mesin	370.987.496.782,12	257.397.333.323,22	113.590.163.458,90
3.	Gedung dan Bangunan	619.743.770.610,95	102.327.362.744,00	517.416.407.866,95
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.389.448.543.547,50	604.941.288.431,48	784.507.255.116,02
5.	Aset Tetap Lainnya	36.928.874.387,00	0,00	36.928.874.387,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.400.269.255,00	0,00	69.400.269.255,00
	Jumlah	4.184.483.761.667,57	964.665.984.498,70	3.219.817.777.168,87

Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.153.587.019.003,84 diperoleh dari mutasi tambah Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp404.558.720.029,34 dan mutasi kurang Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp373.661.977.365,62 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.47 Rincian Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2019	Mutasi Tahun 2020		Saldo Per 31 Desember 2020
			Tambah	Kurang	
1.	Tanah	1.781.056.157.785,00	23.065.049.300,00	106.146.400.000,00	1.697.974.807.085,00
2.	Peralatan dan Mesin	319.289.218.039,12	91.632.270.751,00	39.933.992.008,00	370.987.496.782,12
3.	Gedung dan Bangunan	580.271.883.036,79	52.224.667.404,51	12.752.779.830,35	619.743.770.610,95
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.371.214.240.612,53	188.389.051.808,83	170.154.748.873,87	1.389.448.543.547,50
5.	Aset Tetap Lainnya	33.868.652.879,40	3.255.322.778,00	195.101.270,40	36.928.874.387,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	67.886.866.651,00	45.992.357.987,00	44.478.955.383,00	69.400.269.255,00
	Jumlah	4.153.587.019.003,84	404.558.720.029,34	373.661.977.365,62	4.184.483.761.667,57

1) Tanah	2020	2019
	Rp1.697.974.807.085,00	Rp1.781.056.157.785,00

Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.697.974.807.085,00 dan Rp1.781.056.157.785,00.

Tabel 5.48 Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari 2020 (Audited)	1.781.056.157.785,00	233.024.599.685,00
	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	1.781.056.157.785,00	233.024.599.685,00
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
	a. Mutasi Tambah		
	- Aset Yang Belum Tercatat Dalam KIB Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Penilaian KPKNL Tahun 2020)	22.081.733.000,00	1.547.510.208.100,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
-	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2019 (Penilaian Tanah di bawah jalan dan Irigasi Tahun 2020 dan Hibah dari Pemerintah Pusat)	983.316.300,00	0,00
b.	Mutasi Kurang		
-	Penyerahan Aset Tetap ke Provinsi (SK Penghapusan No. 481/XII/Tahun 2020 Tanggal 14 Desember 2020)	106.146.400.000,00	0,00
-	Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah	0,00	42.150.000,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	1.697.974.807.085,00	1.780.492.657.785,00
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
a.	Mutasi Tambah		
-	Belanja Modal	0,00	563.500.000,00
b.	Mutasi Kurang		
-	Tidak Tergolong Aset	0,00	0,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	1.697.974.807.085,00	1.780.492.657.785,00
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	0,00	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	1.697.974.807.085,00	1.781.056.157.785,00

2) Peralatan dan Mesin	2020	2019
	Rp370.987.496.782,12	Rp319.289.218.039,12

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp370.987.496.782,12 dan Rp319.289.218.039,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Komponen Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2020
 (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
02. 01.	Alat-alat Berat	14.929.096.633,00	8.785.767.819,00
02.	Alat Angkutan	101.162.020.281,20	98.896.251.531,20
03.	Alat Bengkel & Alat ukur	3.152.826.514,00	2.912.865.983,00
04.	Alat Pertanian	1.547.613.293,00	1.405.604.293,00
05.	Alat Kantor & Rumah Tangga	52.473.266.364,36	110.371.714.369,50
06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	9.991.952.013,43	6.682.664.392,09
07.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	105.727.817.015,97	56.014.217.801,37
08.	Alat Laboratorium	43.115.527.393,21	32.690.221.106,96
09.	Alat-alat Persenjataan	1.391.125.500,00	1.529.910.743,00
10.	Komputer	34.098.349.008,55	
13.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	7.500.000,00	
15.	Alat Keselamatan Kerja	1.621.046.342,00	
18.	Rambu-rambu	1.649.555.153,00	
19.	Peralatan Olah Raga	119.801.270,40	
	Jumlah	370.987.496.782,12	319.289.218.039,12

2.1) Alat-alat Berat	2020	2019
	Rp14.929.096.633,00	Rp8.785.767.819,00

Alat-alat Berat per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp14.929.096.633,00 dan Rp8.785.767.819,00. Rincian Mutasi Alat-alat Berat per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Mutasi Alat-alat Berat Per 31 Desember 2020
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	8.785.767.819,00	9.298.067.274,00
	Koreksi Saldo Awal		
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	8.785.767.819,00	9.298.067.274,00
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
a.	Mutasi Tambah		
	Aset Yang Belum Tercatat Dalam KIB Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Penilaian KPKNL Tahun 2020)		
b.	Mutasi Kurang		
	- Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi		1.081.633.000,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	8.785.767.819,00	8.216.434.274,00
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
a.	Mutasi Tambah		
	- Belanja Modal	5.745.774.794,00	668.803.545,00
	- Distribusi dari SKPD Lain/Jenis Aset yg Lain/Lainnya	27.514.900,00	49.980.000,00
b.	Mutasi Kurang		
	- Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2020 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel	100.000,00	
	- Lainnya / Hibah ke Masyarakat (Sekolah Swasta) / Pembayaran Utang Tahun Lalu		149.450.000,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	14.558.957.513,00	49.980.000,00
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	364.554.120,00	
6.	Koreksi BPK	5.585.000,00	
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	14.929.096.633,00	569.333.545,00

2.2) Alat-alat Angkutan	2020	2019
	Rp101.162.020.281,20	Rp98.896.251.531,20

Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp101.162.020.281,20 dan Rp98.896.251.531,20. Rincian Mutasi Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Mutasi Alat-Alat Angkutan Per 31 Desember 2020
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	98.896.251.531,20	92.272.204.379,00
	Koreksi Saldo Awal		
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	98.896.251.531,20	92.272.204.379,00
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
a.	Mutasi Tambah		
	Aset Yang Belum Tercatat Dalam KIB Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja		404.177.770,20
	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2019 (Penilaian Tanah di bawah jalan dan Irigasi Tahun 2020 dan Hibah dari Pemerintah Pusat)	336.150.000,00	
a.	Mutasi Kurang		
	Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara		881.570.500,00
	- Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah		177.200.000,00
	Gedung Yang Dibongkar, Penyerahan ke Gereja Toraja, SMK Tiranis, Kehutanan (SK Penghapusan No. 485/XII/Tahun 2020)	806.339.250,00	
	Penghapusan Kendaraan Dinas yang telah di dom	828.825.000,00	
	- Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi	190.807.000,00	1.791.841.180,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	97.406.430.281,20	89.825.770.469,20
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
a.	Mutasi Tambah		
	- Belanja Modal	3.434.055.000,00	8.431.071.062,00
	- Utang Tahun Berjalan		737.400.000,00
	- Distribusi dari SKPD Lain/Jenis Aset yg Lain/Hibah Yang Diterima/Lainnya		15.810.000,00
b.	Mutasi Kurang		



Tabel 5.53 Rincian Mutasi Alat Pertanian Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	1.405.604.293,00	1.893.043.520,00
	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	1.405.604.293,00	1.893.043.520,00
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
a.	Mutasi Tambah		
-	Aset Yang Belum Tercatat Dalam KIB Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	0,00	0,00
b.	Mutasi Kurang		
-	Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	470.005.200,00
-	Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi	0,00	465.793.959,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	1.405.604.293,00	957.244.361,00
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
a.	Mutasi Tambah		
-	Belanja Modal	129.684.000,00	448.359.932,00
-	Utang Tahun 2020 dan Dana COVID	2.400.000,00	0,00
b.	Mutasi Kurang		
-	Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2020 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel	825.000,00	0,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	1.536.863.293,00	1.405.604.293,00
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	(18.775.000,00)	0,00
6.	Koreksi BPK	29.525.000,00	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	1.547.613.293,00	1.405.604.293,00

2.5) Alat Kantor dan Rumah Tangga

2020
Rp52.473.266.364,36

2019
Rp110.371.714.369,50

Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp52.473.266.364,36 dan Rp110.371.714.369,50. Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	110.371.714.369,50	111.165.975.466,45
	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	110.371.714.369,50	111.165.975.466,45
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
a.	Mutasi Tambah		
-	Kesalahan Pencatatan	0,00	(2.700.000,00)
-	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2019 (Penilaian Tanah di bawah jalan dan Irigasi Tahun 2020 dan Hibah dari Pemerintah Pusat)	279.625.000,00	0,00
b.	Mutasi Kurang		
-	Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	1.497.408.314,00
-	Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah	0,00	35.437.500,00
-	SK Penghapusan BMD Tahun 2020		
-	Gedung Yang Dibongkar, Penyerahan ke Gereja Toraja, SMK Tiranis, Kehutanan (SK Penghapusan No. 485/XII/Tahun 2020)	167.600.000,00	0,00
-	Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi	462.829.288,00	8.212.598.206,00
-	Aset Tetap Pindah ke Aset Lainnya (Ekstrakompatabel) Setelah Perincian Aset Tetap Yang Dicatat Gelondongan	0,00	47.470.000,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	110.020.910.081,50	101.370.361.446,45
3.	Mutasi Tahun Berjalan		



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
	a. Mutasi Tambah		
	- Belanja Modal	15.439.589.903,00	10.384.257.288,00
	- Utang Tahun Berjalan	338.635.000,00	28.160.000,00
	- Distribusi dari SKPD Lain/Jenis Aset yg Lain/Hibah Yang Diterima/Lainnya	1.250.440.115,00	565.412.501,05
	b. Mutasi Kurang		
	- Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2020 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel	6.992.176.570,00	1.615.921.866,00
	- Distribusi/Reklasifikasi ke SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain / Lainnya	2.814.283.200,00	231.300.000,00
	- Lainnya / Pembayaran Utang Tahun Lalu yang dibayar tahun 2020/ hibah ke masyarakat atau sekolah swasta/rusak berat/Baru Biaya Perencanaan / pindah ke Aset Tidak Berwujud / Koreksi BPK	80.000.000,00	129.255.000,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	117.176.960.529,50	110.371.714.369,50
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	(65.335.136.613,14)	0,00
6.	Koreksi BPK	645.287.648,00	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	52.473.266.364,36	110.371.714.369,50

2.6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2020	2019
	Rp9.991.952.013,43	Rp6.772.479.499,09

Alat Studio dan Alat Komunikasi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9.991.952.013,43 dan Rp6.682.664.392,00. Rincian Mutasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Mutasi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	6.682.664.392,09	6.772.479.499,09
	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	6.682.664.392,09	6.772.479.499,09
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
	a. Mutasi Tambah		
	- Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2020	158.187.441,00	0,00
	b. Mutasi Kurang		
	- Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	207.564.000,00
	- SK Penghapusan BMD Tahun 2020		
	- Gedung Yang Dibongkar, Penyerahan ke Gereja Toraja, SMK Tiranis, Kehutanan (SK Penghapusan No. 485/XII/Tahun 2020)	28.830.000,00	0,00
	- Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi	26.181.790,00	471.705.757,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	6.785.840.043,09	6.093.209.742,09
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
	a. Mutasi Tambah		
	- Belanja Modal	1.275.264.763,00	1.371.385.060,00
	- Utang Tahun Berjalan	69.625.000,00	64.900.000,00
	b. Mutasi Kurang		
	- Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2020 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel	2.614.825,00	1.050.000,00
	- Lainnya / Pembayaran Utang Tahun Lalu yang dibayar tahun 2020/ hibah ke masyarakat atau sekolah swasta/rusak berat/Baru Biaya Perencanaan / pindah ke Aset Tidak Berwujud / Koreksi BPK	93.060.000,00	0,00
	- Lainnya / Hibah ke Masyarakat (sekolah swasta) / Pembayaran utang tahun lalu	0,00	845.780.410,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	8.035.054.981,09	6.682.664.392,09
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	1.943.306.399,34	0,00



2.11) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2020 Rp7.500.000,00	2019 Rp0,00
--	--------------------------------------	------------------------------

Rambu-Rambu per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp7.500.000,00 dan Rp0,00 merupakan mappingan dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

2.12) Alat Keselamatan Kerja	2020 Rp1.621.046.342,00	2019 Rp0,00
---	--	------------------------------

Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp1.621.046.342,00 dan Rp0,00 merupakan mappingan dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

2.13) Rambu-Rambu	2020 Rp1.649.555.153,00	2019 Rp0,00
--------------------------	--	------------------------------

Rambu-Rambu per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp1.649.555.153,00 dan Rp0,00 merupakan mappingan dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

2.14) Peralatan Olah Raga	2020 Rp119.801.270,40	2019 Rp0,00
----------------------------------	--	------------------------------

Peralatan Olah Raga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp119.801.270,40 dan Rp0,00 merupakan mappingan dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

3) Gedung dan Bangunan	2020 Rp619.743.770.610,95	2019 Rp580.271.883.036,79
-----------------------------------	--	--

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp619.743.770.610,95 dan Rp580.271.883.036,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59 Komponen Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2020
(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
03. 01	Bangunan Gedung	574.688.942.190,54	543.593.249.855,75
02	Monumen	35.185.674.199,18	36.678.633.181,04
03	Bangunan Menara	358.436.202,00	0,00
04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.510.718.019,23	0,00
Jumlah		619.743.770.610,95	580.271.883.036,79

3.1) Bangunan Gedung	2020 Rp574.688.942.190,54	2019 Rp543.593.249.855,75
---------------------------------	--	--

Bangunan Gedung per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp574.688.942.190,54 dan Rp543.593.249.855,75. Rincian Mutasi Bangunan Gedung per 31 Desember 2020 sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.60 Rincian Mutasi Bangunan Gedung Per 31 Desember 2020
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	543.593.249.855,75	496.080.150.582,70
	Koreksi Saldo Awal	(107.149.389,00)	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	543.486.100.466,75	496.080.150.582,70
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
a.	Mutasi Tambah		
	- Kesalahan Pencatatan	0,00	0,00
	- Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	1.432.487.000,00
	- Aset Yang Belum Tercatat Dalam KIB Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	0,00	6.104.719.000,00
	- Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD (SIMDA Per 31 Desember 2019) (Penilaian KPKNL Tahun 2020)	2.803.712.000,00	0,00
	- Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2019 (Penilaian Tanah di bawah jalan dan Irigasi Tahun 2020 dan Hibah dari Pemerintah Pusat)	6.117.466.285,00	0,00
	- Mutasi Aset Karena Kapitalisasi Gedung		(3.874.811.284,91)
	- Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2020	677.642.557,68	
b.	Mutasi Kurang		
	- Aset Pemerinah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	1.669.437.000,00
	- Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah	0,00	4.319.497.838,34
	- SK Penghapusan BMD Tahun 2020		
	- Gedung Yang Dibongkar, Penyerahan ke Gereja Toraja, SMK Tiranis, Kehutanan (SK Penghapusan No. 485/XII/Tahun 2020)	863.191.010,00	0,00
	- Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi	677.114.165,35	9.761.142.808,66
	- Aset Tetap Pindah ke Aset Lainnya (Ekstrakomtabel) Setelah Perincian Aset Tetap Yang Dicatat Gelondongan	0,00	136.791.721,83
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	551.544.616.134,08	483.855.675.928,96
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
a.	Mutasi Tambah		
	- Belanja Modal	33.125.883.367,00	69.195.811.582,20
	- Utang Tahun Berjalan		1.180.195.228,00
	- Kapitalisasi Aset (Biaya Umum)		708.027.000,00
	- Reklas dari KDP Tahun Lalu yang telah menjadi Aset Permanen di Tahun Berjalan	8.014.519.279,00	7.758.374.600,00
	- Distribusi Dari SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain / Lainnya	225.356.399,83	0,00
	- KDP Tahun 2020 (Aset KDP di Tahun 2020)	(5.584.579.470,00)	0,00
b.	Mutasi Kurang		
	- Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2020 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel	79.104.500,00	300.303.258,00
	- Distribusi/Reklasifikasi ke SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain / Lainnya	2.933.797.915,00	6.285.949.550,41
	- Belanja Modal Tahun Berjalan Dimana s/d 31 Desember Belum Selesai (KDP)	0,00	12.186.929.279,00
	- Lainnya / Pembayaran Utang Tahun Lalu yang dibayar tahun 2020/ hibah ke masyarakat atau sekolah swasta/rusak berat/Baru Biaya Perencanaan / pindah ke Aset Tidak Berwujud / Koreksi BPK	1.188.515.228,00	331.652.396,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	583.124.378.066,91	541.705.027.627,75
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	(8.533.884.754,37)	0,00
6.	Koreksi BPK	98.448.878,00	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	574.688.942.190,54	541.705.027.627,75



3.2) Monumen	2020	2019
	Rp35.185.674.199,18	Rp36.678.633.181,04

Monumen per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp35.185.674.199,18 dan Rp36.678.633.181,04. Rincian Mutasi Monumen per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.61 Rincian Mutasi Monumen

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	36.678.633.181,04	31.088.021.492,37
	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	36.678.633.181,04	31.088.021.492,37
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
	a. Mutasi Tambah		
	- Mutasi Aset Karena Kapitalisasi Gedung	0,00	3.643.014.200,91
	b. Mutasi Kurang		
	- Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah	0,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	36.678.633.181,04	34.731.035.693,28
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
	a. Mutasi Tambah		
	- Belanja Modal	145.839.028,00	609.986.864,80
	- Distribusi dari SKPD Lain/Jenis Aset yg Lain/Hibah Yang Diterima/Lainnya	0,00	28.721.566,96
	- Reklas dari KDP Tahun Lalu yang telah menjadi Aset Permanen di Tahun Berjalan	0,00	1.308.889.056,00
	b. Mutasi Kurang		
	- Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2020 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel	30.000,00	0,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	36.824.442.209,04	36.678.633.181,04
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	(1.638.768.009,86)	0,00
6.	Koreksi BPK	0,00	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	35.185.674.199,18	36.678.633.181,04

3.3) Bangunan Menara	2020	2019
	Rp358.436.202,00	Rp0,00

Bangunan Menara per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp358.436.202,00 dan Rp0,00 merupakan mappingan dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

3.4) Tugu Titik Kontrol/Pasti	2020	2019
	Rp9.510.718.019,23	Rp0,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp8.494.918.409,23 dan Rp0,00 merupakan mappingan dari Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

4) Jalan Irigasi dan Jaringan	2020	2019
	Rp1.389.448.543.547,50	Rp1.371.214.240.612,53

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp1.389.448.543.547,50 dan Rp1.371.214.240.612,53 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.62 Komponen Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020
 (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
04. 01	Jalan dan Jembatan	1.218.497.191.675,91	1.212.916.161.252,71
02	Bangunan Air / Irigasi	136.597.013.267,15	124.431.206.254,86
03	Instalasi	27.384.773.030,10	22.444.492.759,10
04	Jaringan	6.969.565.574,34	11.422.380.345,87
Jumlah		1.389.448.543.547,50	1.371.214.240.612,53

4.1) Jalan dan Jembatan	2020	2019
	Rp1.218.497.191.675,91	Rp1.212.916.161.252,71

Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp1.218.497.191.675,91 dan Rp1.212.916.161.252,71. Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	1.212.668.991.902,71	1.135.861.461.010,47
	Koreksi Saldo Awal	(2.130.611,00)	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	1.212.666.861.291,71	1.135.861.461.010,47
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
	a. Mutasi Tambah		
	- Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	2.529.037.500,00
	- Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD (SIMDA Per 31 Desember 2019) (Penilaian KPKNL Tahun 2020)	7.460.165.000,00	0,00
	- Mutasi Aset Karena Kapitalisasi Gedung	0,00	231.797.084,00
	- Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2020	(3.289.570.127,37)	0,00
	b. Mutasi Kurang		
	- Aset Pemerinah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	53.264.743.242,43
	- Penyerahan Aset Tetap ke Provinsi (SK Penghapusan No. 481/XII/Tahun 2020 Tanggal 14 Desember 2020)	101.879.437.622,33	0,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	1.114.958.018.542,01	1.085.357.552.352,04
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
	a. Mutasi Tambah		
	- Belanja Modal	105.133.220.945,93	109.252.566.660,10
	- Utang Tahun Berjalan	25.695.331.921,90	16.116.431.297,91
	- Distribusi Dari SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain / Lainnya	920.250.000,00	2.983.781.945,00
	- Reklas dari KDP Tahun Lalu yang telah menjadi Aset Permanen di Tahun Berjalan	36.464.436.105,00	36.539.360.695,85
	- Kapitalisasi Aset (Biaya Umum)	1.297.788.380,00	698.900.000,17
	- KDP Tahun 2020 (Aset KDP di Tahun 2020)	(40.328.498.517,00)	0,00
	b. Mutasi Kurang		
	- Belanja Modal Tahun Berjalan dimana s/d 31 Desember Belum Selesai (KDP)	0,00	38.032.431.698,36
	- Lainnya / Pembayaran Utang Tahun Lalu yang dibayar tahun 2020/ hibah ke masyarakat atau sekolah swasta/ rusak berat/ Baru Biaya Perencanaan / pindah ke Aset Tidak Berwujud / Koreksi BPK	27.108.862.124,93	0,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	1.217.031.685.252,91	1.212.916.161.252,71
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	0,01	0,00
6.	Koreksi BPK	1.465.506.423,00	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)		1.218.497.191.675,91	1.212.916.161.252,71



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4.2) Bangunan Air/Irigasi	2020	2019
	Rp136.597.013.267,15	Rp124.431.206.254,86

Bangunan Air/Irigasi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp136.597.013.267,15 dan Rp124.431.206.254,86. Rincian Mutasi Bangunan Air/Irigasi per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.64 Rincian Mutasi Bangunan Air

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	124.678.375.604,85	112.633.480.812,28
	Koreksi Saldo Awal	10.000,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	124.678.385.604,85	112.633.480.812,28
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
	a. Mutasi Tambah		
	- Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	185.142.000,00
	- Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2020	2.408.532.741,76	0,00
	b. Mutasi Kurang		
	- Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	4.016.584.720,02
	- Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi	0,00	293.465.705,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	127.086.918.346,62	108.508.572.387,26
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
	a. Mutasi Tambah		
	- Belanja Modal	3.931.923.117,00	6.100.525.330,00
	- Utang Tahun Berjalan	0,00	5.711.219.865,20
	- Distribusi Dari SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain / Lainnya	702.085.800,00	2.236.936.800,40
	- Reklas dari KDP Tahun Lalu yang telah menjadi Aset Permanen di Tahun Berjalan	0,00	1.873.951.872,00
	b. Mutasi Kurang		
	- Distribusi ke Aset Lain / SKPD Lain	0,00	0,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	131.720.927.263,62	124.431.206.254,85
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	0,00	0,00
6.	Koreksi BPK	4.876.086.003,53	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	136.597.013.267,15	124.431.206.254,85

4.3) Instalasi	2020	2019
	Rp27.384.773.030,10	Rp22.444.492.759,10

Instalasi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp27.384.773.030,10 dan Rp22.444.492.759,10. Rincian Mutasi Instalasi per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.65 Rincian Mutasi Instalasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	22.444.492.759,10	22.336.874.319,10
	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	22.444.492.759,10	22.336.874.319,10
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
	a. Mutasi Tambah		
	- Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2020	526.042.951,00	0,00
	b. Mutasi Kurang		
	- Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	526.835.000,00
	- Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi	0,00	826.569.200,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	22.970.535.710,10	20.983.470.119,10
3.	Mutasi Tahun Berjalan		



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
a.	Mutasi Tambah		
-	Belanja Modal	4.414.237.320,00	1.483.960.400,00
b.	Mutasi Kurang		
-	Distribusi ke Aset Lain / SKPD Lain	0,00	22.937.760,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	27.384.773.030,10	22.444.492.759,10
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	0,00	0,00
6.	Koreksi BPK	0,00	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	27.384.773.030,10	22.444.492.759,10

4.4) Jaringan

2020

2019

Rp6.969.565.574,34

Rp11.422.380.345,87

Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp6.969.565.574,34 dan Rp11.422.380.345,87. Rincian Mutasi Jaringan per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.66 Rincian Mutasi Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	11.422.380.345,87	12.747.226.639,34
	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	11.422.380.345,87	12.747.226.639,34
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
a.	Mutasi Tambah		
-	Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	223.300.000,00
-	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2019 (Penilaian Tanah di bawah jalan dan Irigasi Tahun 2020 dan Hibah dari Pemerintah Pusat)	773.101.707,00	0,00
-	Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2020	(480.835.564,00)	0,00
b.	Mutasi Kurang		
-	Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	2.359.864.285,47
-	Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi	0,00	56.658.665,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	11.714.646.488,87	10.554.003.688,87
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
a.	Mutasi Tambah		
-	Belanja Modal	0,00	708.160.000,00
-	Distribusi dari SKPD Lain/Jenis Aset yg Lain/Hibah Yang Diterima/Lainnya	0,00	233.741.657,00
b.	Mutasi Kurang		
-	Tidak Tergolong Aset	0,00	73.525.000,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	11.714.646.488,87	3.228.240.942,47
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	0,00	0,00
6.	Koreksi BPK	(4.745.080.914,53)	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	6.969.565.574,34	3.228.240.942,47

5) Aset Tetap Lainnya

2020

2019

Rp36.928.874.387,00

Rp33.868.652.879,40

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan serta hewan, ternak, dan tumbuhan. Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp36.928.874.387,00 dan Rp33.868.652.879,40 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.67 Komponen Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
05 01	Bahan Perpustakaan	36.776.999.387,00	33.596.476.609,00
02	Barang Bercorak Kebudayaan	100.375.000,00	220.676.270,40
03	Hewan	0,00	51.500.000,00
05	Tanaman	51.500.000,00	0,00
Jumlah		36.928.874.387,00	33.868.652.879,40

5.1) Bahan **2020** **2019**
Perpustakaan **Rp36.776.999.387,00** **Rp33.596.476.609,00**

Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp36.776.999.387,00 dan Rp33.596.476.609,00,00. Rincian Mutasi Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2020 sebagai berikut: Komponen Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

Tabel 5.68 Rincian Mutasi Bahan Perpustakaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	33.596.476.609,00	39.984.815.145,00
	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	33.596.476.609,00	39.984.815.145,00
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
	a. Mutasi Tambah		
	- Aset Yang Belum Tercatat Dalam KIB Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	0,00	0,00
	b. Mutasi Kurang		
	- Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	0,00	229.443.500,00
	- Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah	0,00	2.300.000,00
	- Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi	0,00	5.925.592.031,00
	- Aset Tetap Pindah ke Aset Lainnya (Ekstrakomtabel) Setelah Perincian Aset Tetap Yang Dicatat Gelondongan	0,00	4.606.908.480,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	33.596.476.609,00	29.220.571.134,00
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
	a. Mutasi Tambah		
	- Belanja Modal	124.795.314,00	4.375.905.475,00
	- Distribusi Dari SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain / Lainnya	2.814.283.200,00	0,00
	b. Mutasi Kurang		
	- Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2020 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakomptabel	74.800.000,00	0,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	36.460.755.123,00	10.301.497.506,00
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	0,00	0,00
6.	Koreksi BPK	316.244.264,00	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	36.776.999.387,00	10.301.497.506,00

5.2) Barang Bercorak **2020** **2019**
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga **Rp100.375.000,00** **Rp220.676.270,40**

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp100.375.000,00 dan Rp220.676.270,40. Rincian Mutasi Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 31 Desember 2020 sebagai berikut:



Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp69.400.269.255,00 dan Rp67.886.866.651,00. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 5.71 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	67.886.866.651,00	54.226.068.882,85
	Koreksi Saldo Awal	79.280.000,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari 2020 Setelah Koreksi	67.966.146.651,00	54.226.068.882,85
2.	Mutasi Hasil Inventarisasi		
a.	Mutasi Tambah		
-	Kesalahan Pencatatan	0,00	0,00
b.	Mutasi Kurang		
-	Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah	0,00	0,00
	Saldo Awal 1 Januari Setelah Inventarisasi	67.966.146.651,00	54.226.068.882,85
3.	Mutasi Tahun Berjalan		
a.	Mutasi Tambah		
-	Reklas dari KDP Tahun Lalu yang telah menjadi Aset Permanen di Tahun Berjalan	(44.478.955.383,00)	(47.480.576.223,85)
-	KDP Tahun Berjalan	45.913.077.987,00	61.181.273.992,00
b.	Mutasi Kurang		
-	Lainnya / Hibah ke Masyarakat (sekolah swasta) / Pembayaran utang tahun lalu	0,00	39.900.000,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 17 Tahun 2007)	69.400.269.255,00	67.886.866.651,00
5.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016	0,00	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2020 (Versi Permendagri No. 108 Tahun 2016)	69.400.269.255,00	67.886.866.651,00

7) Akumulasi	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Penyusutan Aset Tetap	(Rp964.665.984.498,70)	(Rp844.966.534.351,49)

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dan perhitungan penyusutan menggunakan hitungan bulanan bukan tahunan. Untuk memudahkan dan keseragaman perhitungan penyusutan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menggunakan aplikasi SIMDA BMD ver 2.7.9.3 sehingga akan didapatkan data penyusutan yang valid dan seragam untuk seluruh OPD dengan sebelumnya memasukkan parameter kebijakan penyusutan (Kebijakan Akuntansi) tersebut dalam parameter aplikasi. Saldo Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar (Rp964.665.984.498,70) dan (Rp844.966.534.351,49).

Tabel 5.72 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	(94.169.396.793,62)
2	Dinas Kesehatan	(54.919.821.862,00)
3	RSUD Laki pada	(74.008.726.459,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(438.431.568.366,48)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(89.068.033.648,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(4.021.694.370,20)
7	Badan Penanggulangan Bencana	(1.196.096.959,00)
8	Dinas Sosial	(653.042.648,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(13.159.464.389,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(462.948.778,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(3.442.913.240,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(1.402.283.547,00)
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(4.807.451.816,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	(64.124.651.012,00)
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3.047.060.291,00)



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
16	Dinas Perhubungan	(6.476.297.296,00)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.314.801.546,00)
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	(641.732.220,00)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	(844.228.423,00)
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(382.937.147,66)
21	Dinas Kebudayaan	(272.387.366,00)
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(631.248.080,00)
23	Dinas Pariwisata	(3.951.478.953,40)
24	Dinas Pertanian	(20.778.423.361,00)
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(6.781.163.612,00)
26	Sekretariat Daerah	(19.665.398.324,34)
27	Sekretariat DPRD	(7.345.654.708,00)
28	Inspektorat Daerah	(1.958.740.109,00)
29	Kecamatan Makale	(4.257.629.561,00)
30	Kecamatan Makale Utara	(1.806.915.006,00)
31	Kecamatan Makale Selatan	(1.727.160.507,00)
32	Kecamatan Sangalla	(885.089.912,00)
33	Kecamatan Sangalla Utara	(976.123.235,00)
34	Kecamatan Sangalla Selatan	(928.786.778,00)
35	Kecamatan Mengkendek	(1.213.630.373,00)
36	Kecamatan Gandang Batu Sillanan	(1.771.312.731,00)
37	Kecamatan Saluputti	(994.814.161,00)
38	Kecamatan Rembon	(819.660.810,00)
39	Kecamatan Malimbong Balepe	(529.701.076,00)
40	Kecamatan Rantetayo	(1.071.531.243,00)
41	Kecamatan Kurra	(633.132.832,00)
42	Kecamatan Bonggakaradeng	(869.833.063,00)
43	Kecamatan Rano	(487.974.872,00)
44	Kecamatan Bittuang	(727.112.747,00)
45	Kecamatan Masanda	(333.317.871,00)
46	Kecamatan Simbuang	(1.379.448.907,00)
47	Kecamatan Mappak	(755.354.128,00)
48	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	(537.538.321,00)
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.787.323.800,00)
50	PPKD	(6.225.133.088,00)
51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(13.402.106.405,00)
52	Badan Pendapatan Daerah	(1.620.459.954,00)
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	(965.247.792,00)
	Jumlah	(964.665.984.498,70)

d. Aset Lainnya	2020	2019
	<u>Rp29.878.293.731,33</u>	<u>Rp148.576.993.990,88</u>

Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp29.878.293.731,33 dan Rp148.576.993.990,88 yang terdiri dari:

Tabel 5.73 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	417.445.000,00	495.260.000,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	252.407.500,00	252.407.500,00
3	Aset Tak Berwujud	2.797.513.993,00	2.567.513.993,00
4	Aset Lain-Lain	87.755.457.294,33	145.261.812.497,88
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(61.344.530.056,00)	0,00
	Jumlah	29.878.293.731,33	148.576.993.990,88

1) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	2020	2019
	<u>Rp417.445.000,00</u>	<u>Rp495.260.000,00</u>

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp417.445.000 dan Rp495.260.000,00 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang timbul dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pada TA 2016 terdapat kasus ketekoran kas di Dinas Kesehatan sebesar Rp400.000.000,00 dan sedang dalam proses di aparat penegak hukum dan belum ada setoran ke kas daerah dan penggunaan secara pribadi sebesar Rp17.445.000,00 oleh bendahara penerimaan Kecamatan Sanggala Utara atas penerimaan retribusi rumah potong



hewan TA 2018. Penggunaan dana secara pribadi sebesar Rp77.815.000,00 oleh Sdr N (Kasubag Kepegawaian TA 2019) Kecamatan Makale Selatan atas penerimaan retribusi rumah potong hewan TA 2019 telah disetor ke kas daerah pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan nomor STS 2504.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2020	2019
	Rp252.407.500,00	Rp252.407.500,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp252.407.500,00 merupakan perjanjian penyerahan/penggunaan tanah hak pengelolaan antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan PT Makassar Inti Permai, sesuai perjanjian (Amandemen) Nomor 130/1001/Hukum tanggal 19 Juli 1999, berupa pembangunan 109 buah ruko diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluas 7.344 m2 terletak di Pasar Bolu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Saluran Drainase	61.700.000,00	61.700.000,00
2	Pelataran Keliling	76.182.500,00	76.182.500,00
3	Trotoar	16.900.000,00	16.900.000,00
4	Taman/Jalur Hijau	82.400.000,00	82.400.000,00
5	Pohon Pelindung	5.725.000,00	5.725.000,00
6	Lampu-lampu taman	9.500.000,00	9.500.000,00
	Jumlah	252.407.500,00	252.407.500,00

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset dari Kabupaten Tana Toraja ke Kabupaten Toraja Utara Nomor 35/III/2011/BPKAD tanggal 25 Maret 2011 telah diserahkan Tanah Pasar Bolu Rantepao dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, tetapi aset pendukung yang berada pada tanah tersebut masih disajikan sebagai aset kemitraan.

3) Aset Tidak Berwujud	2020	2019
	Rp2.797.513.993,00	Rp2.567.513.993,00

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.797.513.993,00 dan Rp2.567.513.993,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Aset Tidak Berwujud (Software)
 (dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tahun 2020		Saldo Akhir 31 Desember 2020
			Bertambah	Berkurang	
1	Dinas Kesehatan	99.880.000,00	0,00	0,00	99.880.000,00
2	RSUD Laki-pada	388.800.000,00	0,00	0,00	388.800.000,00
3	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34.950.000,00	0,00	0,00	34.950.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	39.930.000,00	0,00	0,00	39.930.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	248.160.000,00	0,00	0,00	248.160.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.895.000,00	0,00	0,00	26.895.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	338.873.993,00	0,00	0,00	338.873.993,00
8	Sekretariat Daerah	94.820.000,00	0,00	0,00	94.820.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	480.227.000,00	0,00	0,00	480.227.000,00
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	596.023.000,00	0,00	0,00	596.023.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	169.455.000,00	80.000.000,00	0,00	399.455.000,00
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Jumlah	2.567.513.993,00	80.000.000,00	0,00	2.797.513.993,00



Rincian Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

4) Aset Lain-Lain	2020	2019
	Rp87.755.457.294,33	Rp145.261.812.497,88

Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode 2020 dan 2019 sebesar Rp87.755.457.294,33 dan Rp145.261.812.497,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Komponen Aset Lainnya-Aset Lain-lain Tahun 2019
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Saldo Per 31 Desember 2019
1	Peralatan dan Mesin	64.092.500.130,32	65.025.233.451,32
2	Gedung dan Bangunan	13.516.063.914,01	12.759.399.748,66
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.446.828.245,00	58.625.402.992,90
4	Aset Tetap Lainnya	8.700.065.005,00	8.851.776.305,00
	Jumlah Aset Tetap	87.755.457.294,33	145.261.812.497,88

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

a) Peralatan dan Mesin	2020	2019
	Rp64.092.500.130,32	Rp65.025.233.451,32

Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp64.092.500.130,32 dan Rp65.025.233.451,32 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	64.802.501.251,32
2.	Mutasi Tahun 2020	
	a. Mutasi Tambah	
	- Ubah Kondisi Tahun 2020 (Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya di Tahun 2020)	1.158.393.078,00
	- Hibah Dari Pusat (Barang Yang Diserahkan Dari Pusat Kondisi Rusak Berat)	8.074.812.915,00
	- Reklas Aset Lainnya di Tahun 2020	0,00
	b. Mutasi Kurang	
	- Penghapusan Aset Lainnya Tahun 2020	9.943.207.114,00
	Jumlah	64.092.500.130,32

b) Gedung dan Bangunan	2020	2019
	Rp13.516.063.914,01	Rp12.759.399.748,66

Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp13.516.063.914,01 dan Rp12.759.399.748,66 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	12.904.399.748,66
2.	Mutasi Tahun 2020	
	a. Mutasi Tambah	
	- Ubah Kondisi Tahun 2020 (Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya di Tahun 2020)	677.114.165,35
	- Hibah Dari Pusat (Barang Yang Diserahkan Dari Pusat Kondisi Rusak Berat)	0,00
	- Reklas Aset Lainnya di Tahun 2020	0,00
	b. Mutasi Kurang	
	- Penghapusan Aset Lainnya Tahun 2020	65.450.000,00



	Jumlah	13.516.063.914,01
--	---------------	--------------------------

c) Jalan, Jaringan dan Irigasi	2020	2019
	Rp1.446.828.245,00	Rp58.625.402.992,90

Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.446.828.245,00 dan Rp58.625.402.992,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.79 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	58.625.402.992,90
2.	Mutasi Tahun 2020	
	a. Mutasi Tambah	
	- Ubah Kondisi Tahun 2020 (Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya di Tahun 2020)	0,00
	- Hibah Dari Pusat (Barang Yang Diserahkan Dari Pusat Kondisi Rusak Berat)	0,00
	- Reklas Aset Lainnya di Tahun 2020	0,00
	b. Mutasi Kurang	
	- Penghapusan Aset Lainnya Tahun 2020	57.178.574.747,90
	Jumlah	1.446.828.245,00

d) Aset Tetap Lainnya	2020	2019
	Rp8.700.065.005,00	Rp8.851.776.305,00

Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.700.065.005,00 dan Rp8.851.776.305,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020
1.	Saldo Awal 1 Januari (Audited)	8.929.508.505,00
2.	Mutasi Tahun 2020	
	a. Mutasi Tambah	
	- Ubah Kondisi Tahun 2020 (Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya di Tahun 2020)	0,00
	- Hibah Dari Pusat (Barang Yang Diserahkan Dari Pusat Kondisi Rusak Berat)	0,00
	- Reklas Aset Lainnya di Tahun 2020	0,00
	b. Mutasi Kurang	
	- Penghapusan Aset Lainnya Tahun 2020	229.443.500,00
	Jumlah	8.700.065.005,00

5) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	2020	2019
	(Rp61.344.530.056,00)	Rp0,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode 31 Desember 2020 sebesar (Rp61.344.530.056).

2. Kewajiban	2020	2019
	Rp71.539.681.230,00	Rp50.714.445.113,00



Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp71.539.681.230,00 dan Rp50.714.445.113,00 yang terdiri atas:

Tabel 5.81 Rincian Kewajiban

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Kewajiban Jangka Pendek	71.539.681.230,00	50.714.445.113,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		71.539.681.230,00	50.714.445.113,00

a. Kewajiban Jangka Pendek	2020	2019
	<u>Rp71.539.681.230,00</u>	<u>Rp50.714.445.113,00</u>

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp71.539.681.230,00 dan Rp50.714.445.113,00 yang terdiri atas:

Tabel 5.82 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	239.123.338,00	375.825.086,00
2	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten / Kota	7.785.000,00	7.785.000,00
3	Utang Belanja	3.845.981.220,00	6.236.884.742,00
4	Utang Kepada Pihak Ketiga	67.446.791.672,00	44.093.950.285,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		71.539.681.230,00	50.714.445.113,00

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2020	2019
	<u>Rp239.123.338,00</u>	<u>Rp375.825.086,00</u>

Utang Pemotongan PPH/PPN Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merupakan utang pemerintah atas pemotongan PPh/PPN Pusat yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2020 sebesar Rp239.123.338,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.83 Rincian Utang PFK

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan	17.587.177,00	35.449.818,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	13.525.361,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.878.011,00	
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.600.000,00	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	130.850,00	22.780.114,00
6	Sekretariat Daerah	125.531.532,00	288.134.088,00
7	Kecamatan Sangalla Utara	1.137.773,00	0,00
8	Kecamatan Saluputti		1.207.000,00
9	Kecamatan Kurra	12.268.419,00	583.720,00
10	Kecamatan Masanda	2.083.473,00	899.985,00
11	Kecamatan Mappak		1.550.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		11.695.000,00
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.906.103,00	0,00
Total		239.123.338,00	375.825.086,00

2) Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	2020	2019
	<u>Rp7.785.000,00</u>	<u>Rp7.785.000,00</u>

Jumlah Utang kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.785.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 11**. Bagian lancar utang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah utang jasa giro dan utang penerimaan BPHTB ke Kabupaten Toraja Utara.



3) Utang Belanja	2020	2019
	Rp3.845.981.220,00	Rp6.236.884.742,00

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.845.981.220,00 dan Rp6.236.884.742,00 pada RSUD Lakipadada yang terdiri dari:

Tabel 5.84 Rincian Utang Belanja
 (dalam rupiah)

No	Nama OPD	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Jasa Obat dan Medik Umum :		
	- TCM	4.967.570,00	2.316.250,00
2	Jasa Obat dan Medik BPJS :		
	- Mei (Resep Obat Program 7-23)	0,00	8.724.832,00
	- Oktober	0,00	1.993.476.328,62
	- Nopember	1.657.586.699,00	2.154.513.449,17
	- Desember	0,00	2.077.853.881,84
	- Jasa Pelayanan	1.357.226.951,00	0,00
	- Jasa Pelayanan Covid-19	826.200.000,00	0,00
	Jumlah	3.845.981.220,00	6.236.884.742,00

4) Utang Kepada Pihak Ketiga	2020	2019
	Rp67.446.791.672,00	Rp44.093.950.285,00

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp67.446.791.672,00 dan Rp44.093.950.285,00. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan utang kepada rekanan/pelaksana atas pekerjaan/kegiatan yang memiliki kemajuan fisik pekerjaan lebih besar dibandingkan nilai uang yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020. Dari nilai utang tersebut, diantaranya sebesar Rp119.709.514,00 merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga pada BLUD RSUD Lakipadada yang terdiri dari utang telepon, air dan listrik sebesar Rp55.855.423,00 dan utang kepada rekanan sebesar Rp63.854.091,00. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

b. Kewajiban Jangka Panjang	2020	2019
	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban jangka panjang pada Kabupaten Tana Toraja.

3. Ekuitas	2020	2019
	Rp3.329.054.741.771,90	Rp3.534.951.256.014,71

Jumlah Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.329.054.741.771,90 dan Rp3.534.951.256.014,71.

5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1. Pendapatan – LO	2020	2019
---------------------------	-------------	-------------



Rp1.126.357.317.169,75

Rp1.073.788.288.743,79

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.126.357.317.169,75 dan Rp1.073.788.288.743,79. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.85 Rincian Pendapatan LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019
	KEGIATAN OPERASIONAL		
	PENDAPATAN		
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
a)	Pendapatan Pajak Daerah	11.785.834.918,50	11.594.846.322,00
b)	Pendapatan Retribusi Daerah	7.126.938.753,75	13.250.300.526,00
c)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.599.872.702,00	7.443.699.740,00
d)	Lain-lain PAD yang Sah	77.095.870.772,94	89.405.676.784,26
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	104.608.517.147,19	121.694.523.372,26
2.	PENDAPATAN TRANSFER		
a.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1)	Dana Bagi Hasil Pajak	11.426.556.537,00	7.675.244.233,00
2)	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak(Sumber Daya Alam)	4.125.943.519,00	5.602.584.508,00
3)	Dana Alokasi Umum	544.504.787.000,00	597.506.321.000,00
4)	Dana Alokasi Khusus	88.403.498.410,00	106.188.499.822,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	648.460.785.466,00	716.972.649.563,00
b.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
1)	Dana Penyesuaian	109.331.348.239,00	101.379.530.637,00
2)	Dana Lembang	123.466.390.025,00	29.077.881.700,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	232.797.738.264,00	130.457.412.337,00
c.	Transfer Pemerintah Provinsi		
1)	Bantuan Keuangan	38.966.470.400,00	45.742.397.812,62
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	38.966.470.400,00	45.742.397.812,62
	Jumlah Pendapatan Transfer	920.224.994.130,00	893.172.459.712,62
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH		
a)	Pendapatan Hibah	62.988.294.638,00	58.332.827.258,91
b)	Pendapatan Lainnya	38.535.511.254,56	588.478.400,00
	Jumlah Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	101.523.805.892,56	58.921.305.658,91
	JUMLAH PENDAPATAN	1.126.357.317.169,75	1.073.788.288.743,79

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah	2020	2019
	<u>Rp104.608.517.147,19</u>	<u>Rp121.694.523.372,26</u>
a. Pendapatan Pajak Daerah	2020	2019
	<u>Rp11.785.834.918,50</u>	<u>Rp11.594.846.322,00</u>

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sampai dengan 31 Desember 2020, saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp11.785.834.918,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019
1	Pajak Hotel-LO	304.003.100,00	410.548.652,00
2	Pajak Restoran-LO	321.597.605,00	474.870.092,00
3	Pajak Hiburan-LO	16.025.320,00	13.052.500,00
4	Pajak Reklame-LO	770.827.923,00	503.444.503,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	4.887.584.500,00	4.836.839.134,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.109.684.340,00	1.816.818.914,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	3.151.285.651,00	2.063.530.542,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	1.224.826.479,50	1.475.741.985,00
Jumlah		11.785.834.918,50	11.594.846.322,00

b. Pendapatan	2020	2019
Retribusi Daerah	Rp7.126.938.753,75	Rp13.250.300.526,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan Retribusi Daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp7.126.938.753,75 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.87 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2019	Saldo Tahun 2018
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan – LO	959.377.347,00	897.125.200,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	90.570.000,00	409.950.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	318.351.000,00	701.685.350,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	130.200.000,00	113.023.500,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	79.250.000,00	2.000.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera Ulang - LO	(11.122.500,00)	82.830.500,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	136.515.200,00	174.640.000,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	346.080.425,00	961.987.601,00
9	Retribusi Terminal – LO	91.281.000,00	348.415.000,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	67.080.000,00	161.000.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	2.451.320.000,00	3.006.707.500,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.465.302.500,00	5.669.647.600,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	981.232.781,75	651.681.275,00
14	Retribusi Izin Trayek – LO	21.501.000,00	69.607.000,00
Jumlah		7.126.938.753,75	7.126.938.753,75

c. Pendapatan Hasil	2020	2019
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp8.599.872.702,00	Rp7.443.699.740,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp8.599.872.702,00 merupakan deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Bank Sulselbar berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa Nomor 02 Tanggal 2 Desember 2020.

d. Lain-Lain PAD yang Sah	2020	2019
	Rp77.095.870.772,94	Rp89.405.676.784,26

Lain-lain PAD yang Sah-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp77.095.870.772,94 terdiri dari:

Tabel 5.88 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019
1	Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	106.162.266,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya – LO	92.369.000,00	61.230.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro – LO	2.655.284.929,00	2.247.223.817,00
4	Pendapatan Bunga – LO	1.733.219.177,00	2.383.287.657,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	(2.985.984.548,54)	3.845.937.959,07
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	468.137.817,00	383.238.141,66
7	Pendapatan Denda Pajak – LO	4.389.607,00	6.231.709,32
8	Pendapatan dari Pengembalian –LO	1.313.294.406,00	797.403.834,00
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO	27.600.000,00	42.401.000,00
10	Pendapatan BLUD-LO	57.720.642.827,48	58.350.460.255,21
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	(488.692.601,00)
12	Dana Kapitasi – LO	12.066.917.558,00	21.670.792.746,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Dana Tidak Terduga	4.000.000.000,00	0,00



	Jumlah	77.095.870.772,94	89.405.676.784,26
--	---------------	--------------------------	--------------------------

2. Pendapatan Transfer	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Dana Perimbangan	Rp648.460.785.466,00	Rp716.972.649.563,00

Pada tahun 2020 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan pendapatan transfer dana perimbangan sebesar Rp648.460.785.466,00. Pendapatan transfer dana perimbangan ini terdiri dari pendapatan yang di transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat-LO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Rp11.426.556.537,00	Rp7.675.244.233,00

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp11.426.556.537,00 terdiri dari:

Tabel 5.89 Rincian Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO	3.680.137.935,00	4.768.435.142,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21 – LO	7.746.418.602,00	2.669.123.400,00
3	Bea/Cukai Hasil Tembakau	0,00	237.685.691,00
Jumlah		11.426.556.537,00	7.675.244.233,00

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Rp4.125.943.519,00	Rp5.602.584.508,00

Pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Pusat-LO sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.125.943.519,00 dan Rp5.602.584.508,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.90 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak Pemerintah Pusat-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan – LO	28.376.422,00	9.654.000,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	0,00	32.995.200,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	3.020.001.352,00	2.563.008.971,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	788.276.289,00	590.155.800,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	91.656,00	123.530,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO	289.197.800,00	1.505.812.000,00
7	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batuan		900.835.007,00
Jumlah		4.125.943.519,00	5.602.584.508,00

c. Dana Alokasi Umum	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Rp544.504.787.000,00	Rp597.506.321.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp544.504.787.000,00 dan Rp597.506.321.000,00 yang merupakan pendapatan Transfer-LO berupa DAU dari Pemerintah Pusat yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020.

d. Dana Alokasi Khusus	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Rp88.403.498.410,00	Rp106.188.499.822,00



Jumlah Dana Alokasi Khusus-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp88.403.498.410,00 dan Rp106.188.499.822,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.91 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019
1	DAK Bidang Pendidikan – LO	19.572.385.000,00	13.149.808.000,00
2	DAK Bidang Kesehatan – LO	31.133.727.516,00	34.858.627.337,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi- LO	1.177.262.782,00	3.309.039.750,00
4	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan- LO	1.067.649.183,00	782.956.300,00
5	DAK Bidang Lingkungan Hidup – LO	0,00	819.492.250,00
6	DAK Bidang AFFIRMASI - LO	21.596.354.000,00	39.168.685.659,00
7	DAK Bidang Pertanian- LO	1.108.000.000,00	940.131.250,00
8	DAK Bidang Irigasi – LO	1.280.893.300,00	3.536.312.276,00
9	DAK Bidang Pariwisata	3.828.762.629,00	4.422.700.000,00
10	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	3.520.843.000,00	0,00
11	DAK Bidang Pasar	0,00	3.320.995.000,00
12	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	1.879.752.000,00
13	DAK Bidang Sanitasi	4.117.621.000,00	0,00
Jumlah		88.403.498.410,00	106.188.499.822,00

3. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	2020	2019
	Rp232.797.738.264,00	Rp130.457.412.337,00

a. Dana Penyesuaian	2020	2019
	Rp109.331.348.239,00	Rp101.379.530.637,00

Jumlah Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp109.331.348.239,00 dan Rp101.379.530.637,00. Dana Penyesuaian merupakan realisasi atas dana yang dialokasikan kepada Kabupaten Tana Toraja dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang terdiri dari:

Tabel 5.92 Rincian Dana Penyesuaian - LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019
1	Dana Penyesuaian Pendapatan Profesi Guru PNSD - LO	62.253.317.000,00	63.845.165.848,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	1.477.904.000,00	1.455.000.000,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LO	3.161.400.000,00	2.014.800.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan - LO	27.976.390.713,00	20.151.087.089,00
5	Bantuan Operasional KB - LO	4.312.869.173,00	4.054.297.500,00
6	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	1.138.383.755,00	1.287.288.200,00
7	Tunjangan Khusus Guru	7.350.526.000,00	6.108.254.000,00
8	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LO	902.350.000,00	1.550.600.000,00
9	Dana Pelayanan Kepariwisata - LO	340.849.598,00	913.038.000,00
10	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	
JUMLAH		109.331.348.239,00	101.379.530.637,00

b. Dana Lembang	2020	2019
	Rp123.466.390.025,00	Rp588.478.400,00

Jumlah Dana Lembang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp123.466.390.025,00 dan Rp588.478.400,00. Dana Lembang merupakan realisasi atas dana yang dialokasikan kepada



Kabupaten Tana Toraja dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah terkait desa.

4. Transfer Pemerintah Provinsi	2020	2019
	Rp38.966.470.400,00	Rp29.077.881.700,00
a. Bantuan Keuangan	2020	2019
	Rp38.966.470.400,00	Rp29.077.881.700,00

Jumlah Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp38.966.470.400,00 dan Rp29.077.881.700,00.

5. Pendapatan Lain-lain yang Sah	2020	2019
	Rp101.523.805.892,56	Rp104.075.225.071,53
a. Pendapatan Hibah	2020	2019
	Rp62.988.294.638,00	Rp58.332.827.258,91

Jumlah Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp62.988.294.638,00 dan Rp58.332.827.258,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93 Rincian Hibah - LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	19.135.206.657,00	0,00
2	Hibah Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	43.853.087.981,00	45.883.579.910,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	12.449.247.348,91
	JUMLAH	62.988.294.638,00	58.332.827.258,91

b. Pendapatan Lainnya	2020	2019
	Rp38.535.511.254,56	Rp45.742.397.812,62

Jumlah Pendapatan Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp38.535.511.254,56 dan Rp45.742.397.812,62, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2020	Saldo Tahun 2019
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	7.714.036.348,00	9.942.586.962,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	4.917.665.669,00	7.929.890.366,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	10.170.270.147,00	13.189.460.965,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO	183.968.391,00	311.609.485,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	15.280.206.153,56	14.368.850.034,62
6	Bagi Hasil Bea Cukai dari Hasil Tembakau-LO	178.658.130,00	0,00
7	Bagi Hasil Getah Pinus - LO	90.706.416,00	0,00
	JUMLAH	38.535.511.254,56	45.742.397.812,62



2. BEBAN	2020	2019
	Rp1.092.438.299.833,32	Rp975.292.201.848,86

Pada tahun 2020 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan angka Beban pada laporan operasional sebesar Rp1.092.438.299.833,32 dan Rp975.292.201.848,86.

a. Beban Pegawai	2020	2019
	Rp386.398.392.752,00	Rp401.710.940.289,00

Jumlah Beban Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp386.398.392.752,00 dan Rp401.710.940.289,00. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 5.95 Rincian Beban Pegawai - LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	296.846.004.396,00	306.441.095.324,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	85.807.221.999,00	88.621.145.812,00
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH- LO	2.828.000.000,00	4.380.000.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	327.626.928,00	0,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	397.597.429,00	717.936.153,00
6	Uang Lembur-LO	191.942.000,00	1.550.763.000,00
Jumlah Beban Pegawai		386.398.392.752,00	401.710.940.289,00

b. Beban Persediaan	2020	2019
	Rp20.075.176.172,70	Rp22.125.088.317,83

Beban persediaan pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp20.075.176.172,70 dan Rp22.125.088.317,83. Beban persediaan diakui apabila persediaan telah digunakan. Pendekatan yang digunakan untuk persediaan pada Kabupaten Tana Toraja adalah pendekatan aset. Dimana seluruh persediaan yang dibeli diakui semua bebannya. Kemudian saat akhir tahun, dilakukan penilaian kembali atas persediaan. Apabila masih terdapat nilai persediaan, maka harus dilakukan pengurangan beban di akhir tahun.

Tabel 5.96 Rincian Beban Persediaan – LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Bahan Pakai Habis	3.583.236.973,00	6.187.078.265,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	6.602.830.926,70	11.903.757.992,83
3	Beban Cetak dan Penggandaan	1.428.616.120,00	4.034.252.060,00
4	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.460.492.153,00	0,00
Jumlah Beban Persediaan		20.075.176.172,70	22.125.088.317,83

c. Beban Jasa	2020	2019
	Rp190.553.232.010,05	Rp264.885.314.341,19

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp190.553.232.010,05 dan Rp264.885.314.341,19. Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium



kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.97 Rincian Beban Jasa - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Jasa Kantor	6.776.464.517,00	7.452.114.199,00
2	Belanja Premi Asuransi	21.663.345.309,00	14.902.282.230,00
3	Beban Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	171.350.000,00	436.655.000,00
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	69.008.500,00	428.400.000,00
5	Beban Sewa Alat Berat		297.874.000,00
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	299.800.000,00	169.665.000,00
7	Beban Makanan dan Minuman	7.525.079.250,00	12.311.888.910,82
8	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	772.622.000,00	2.869.004.200,00
9	Beban Pakaian Kerja	47.200.000,00	390.562.200,00
10	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	319.000.000,00	1.359.264.200,00
11	Beban Jasa Konsultasi	1.033.561.300,00	2.106.413.630,00
12	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		18.469.292.606,00
13	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	207.000.000,00	54.600.000,00
14	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	175.245.900,00	4.265.815.015,00
15	Beban Honorarium PNS	17.892.119.089,00	25.771.394.500,00
16	Beban Honorarium Non PNS	361.990.000,00	6.156.660.000,00
17	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga		2.373.921.300,00
18	Beban Barang Dana BOS	25.038.694.690,00	26.394.782.408,00
19	Beban Barang Tanggap Darurat	91.990.000,00	282.856.000,00
20	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.765.156.915,00	62.967.405.483,00
21	Beban Operasional Manajemen Mutu		1.638.500.000,00
22	Beban Pegawai BLUD RSUD	32.616.486.483,00	34.378.135.377,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	21.999.222.196,05	22.260.945.131,37
24	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD	21.000.000,00	21.000.000,00
25	Beban Operasional Kesehatan	575.850.800,00	674.456.650,00
26	Beban Buku Putusan Pengadilan	500.000,00	1.250.000,00
27	Beban Pegawai BOK	4.279.681.792,00	411.600.000,00
28	Beban Pegawai JKN	213.837.000,00	162.001.000,00
29	Belanja Barang dan Jasa BOK	9.256.422.650,00	12.239.648.086,00
30	Belanja Barang dan Jasa JKN	3.380.603.619,00	3.636.927.215,00
	Jumlah Beban Jasa	190.553.232.010,05	264.885.314.341,19

d. Beban Pemeliharaan	2020	2019
	Rp8.507.816.034,00	Rp16.637.408.542,00

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.507.816.034,00 dan Rp16.637.408.542,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.98 Rincian Beban Pemeliharaan - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	3.485.602.840,00	6.204.186.396,00
2	Beban Pemeliharaan	5.022.213.194,00	10.433.222.146,00
	Jumlah Pemeliharaan	8.507.816.034,00	16.637.408.542,00

e. Beban Perjalanan Dinas	2020	2019
	Rp16.786.346.742,00	Rp39.616.217.728,00

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.786.346.742,00 dan Rp39.616.217.728,00.



f. Beban Subsidi	2020	2019
	Rp1.500.000.000,00	Rp0,00

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Rp0,00.

g. Beban Hibah	2020	2019
	Rp49.531.796.000,00	Rp25.736.813.348,91

Beban Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp49.531.796.000,00 dan Rp25.736.813.348,91. Beban Hibah merupakan Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

h. Beban Bantuan Sosial	2020	2019
	Rp18.000.000,00	Rp18.000.000,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp18.000.000,00 dan Rp18.000.000,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

i. Beban Penyusutan	2020	2019
	Rp165.124.715.833,88	Rp139.825.075.311,49

Jumlah Beban Penyusutan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp165.124.715.833,88 dan Rp139.825.075.311,49. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

j. Beban Penyisihan Piutang	2020	2019
	Rp1.010.509.398,69	Rp973.046.332,44

Beban Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Piutang untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp1.010.509.398,69 dan Rp973.046.332,44. Rincian Beban Piutang untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99 Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	309.374.363,69	269.040.015,84
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	701.135.035,00	704.006.316,60
Jumlah Beban Penyisihan Piutang		1.010.509.398,69	973.046.332,44

k. Beban Transfer	2020	2019
	Rp186.894.411.198,00	Rp62.407.497.638,00

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp186.894.411.198,00 dan Rp62.407.497.638,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.100 Rincian Beban Transfer - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	332.377.150,00	234.285.465,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	185.899.481.600,00	61.529.604.400,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448,00	643.607.773,00
	Jumlah Beban Transfer	186.894.411.198,00	62.407.497.638,00

1. Beban Tidak Terduga	2020	2019
	Rp57.368.442.002,00	Rp1.356.800.000,00

Jumlah Beban Tidak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp57.368.442.002,00 dan Rp1.356.800.000,00.

3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	2020	2019
	Rp80.643.741.428,39	Rp1.536.126.106.140,78

Jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp80.643.741.428,39 dan Rp1.536.126.106.140,78. Surplus tersebut untuk mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang aset.

a. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2020	2019
	Rp80.643.741.428,39	Rp1.536.126.106.140,78

Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp80.643.741.428,39 dan Rp1.536.126.106.140,78.

b. Beban Luar Biasa Lainnya	2020	2019
	(Rp164.235.874.952,33)	Rp0,00

Jumlah Beban Luar Biasa Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp164.235.874.952,33) dan Rp0,00.

4. Surplus/defisit LO	2020	2019
	(Rp210.960.599.044,29)	Rp1.634.622.193.035,71

Pada tahun 2020 dan tahun 2019 surplus defisit LO disajikan sebesar (Rp210.960.599.044,29) dan sebesar Rp1.634.622.193.035,71.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	2020	2019
	Rp211.967.145.418,70	Rp247.130.776.605,80

Kas Bersih diperoleh dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp211.967.145.418,70 dan Rp247.130.776.605,80 yang terdiri dari:

Tabel 5.101 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Arus Masuk Kas	1.132.684.863.534,75	1.190.564.343.021,08
2	Arus Keluar Kas	920.717.718.116,05	943.433.566.415,28
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	211.967.145.418,70	247.130.776.605,80



a. Arus Masuk Kas **2020** **2019**
Rp1.132.684.863.534,75 **Rp1.190.564.343.021,08**

Arus Masuk Kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.132.684.863.534,75 dan Rp1.190.564.343.021,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Penerimaan Pajak Daerah	11.028.317.168,50	12.366.450.845,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.163.530.253,75	12.803.711.427,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.599.872.702,00	7.443.699.740,00
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.144.343.387,94	86.850.306.329,55
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	11.426.556.537,00	7.437.558.542,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	4.216.649.935,00	5.602.584.508,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	544.504.787.000,00	592.384.301.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	134.003.625.649,00	106.188.499.822,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	63.731.221.000,00	101.379.530.637,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	38.266.146.708,56	45.980.083.503,62
11	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi	39.145.128.530,00	29.077.881.700,00
12	Penerimaan Hibah	62.988.294.638,00	58.332.827.258,91
13	Penerimaan Lainnya	123.466.390.025,00	124.716.907.708,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.132.684.863.534,75	1.190.564.343.021,08

b. Arus Keluar Kas **2020** **2019**
Rp920.717.718.116,05 **Rp943.433.566.415,28**

Arus Kas Keluar yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019 untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp920.717.718.116,05 dan Rp943.433.566.415,28 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103 Rincian Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Pembayaran Pegawai	441.762.507.116,00	463.468.711.166,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	170.993.682.474,05	259.507.402.251,37
3	Pembayaran Subsidi	1.500.000.000,00	
4	Pembayaran Hibah	63.034.017.328,00	33.021.257.599,91
5	Pembayaran Bantuan Sosial	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Bantuan Keuangan	186.562.034.048,00	185.827.109.933,00
7	Pembayaran Tak Terduga	56.515.100.000,00	1.356.800.000,00
8	Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	332.377.150,00	108.575.937,00
Jumlah Arus Keluar Kas		920.717.718.116,05	943.433.566.415,28

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi **2020** **2019**
(Rp191.525.186.723,53) **(Rp221.999.197.447,63)**

Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi/investasi aset non keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp191.525.186.723,53) dan (Rp221.999.197.447,63) yang terdiri dari:

Tabel 5.104 Rincian Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	191.525.186.723,53	221.999.197.447,63
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		(191.525.186.723,53)	(221.999.197.447,63)



a. Arus Masuk Kas	2020	2019
	Rp0,00	Rp0,00

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Arus Keluar Kas	2020	2019
	Rp191.525.186.723,53	Rp221.999.197.447,63

Arus Kas Keluar selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019 untuk aktivitas investasi aset non keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar Rp191.525.186.723,53 dan Rp221.999.197.447,63 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Perolehan Tanah	0,00	563.500.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	37.569.459.855,60	30.433.026.086,53
3	Perolehan Gedung & Bangunan	31.170.135.375,00	69.585.676.567,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi & Jaringan	119.144.404.176,93	118.489.964.490,10
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.641.187.316,00	2.927.030.304,00
Jumlah Arus Keluar Kas		191.525.186.723,53	221.999.197.447,63

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	2020	2019
	0,00	(Rp5.000.000.000,00)

Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp5.000.000.000,00) yang terdiri dari :

a. Arus Kas Masuk	2020	2019
	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dari aktivitas pendanaan Arus Kas Masuk yang diperoleh adalah sebesar Rp0,00.

b. Arus Keluar Kas	2020	2019
	Rp0,00	Rp5.000.000.000,00

Arus Keluar Kas yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019 untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan adalah sebesar Rp0,00 dan Rp5.000.000.000,00 yaitu penambahan penyertaan modal.

4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/NonAnggaran	2020	2019
	(Rp136.701.748,00)	Rp90.153.856,00

Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp136.701.748,00) dan Rp90.153.856,00. Aktivitas Transitoris/Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK). Aktivitas penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga terdiri dari penerimaan dan pembayaran Tabungan Perumahan Pegawai (Taperum), Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang dan jasa.



Tabel 5.106 Rincian Arus Kas untuk Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
I	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	47.180.062.206,00	
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2020	239.123.338,00	375.825.086,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	47.419.185.544,00	375.825.086,00
II	Arus Keluar Kas		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	47.180.062.206,00	
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2019	375.825.086,00	190.411.230,00
	Selisih Kas Neraca dan LRA		95.260.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	47.555.887.292,00	285.671.230,00
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(136.701.748,00)	90.153.856,00

5. Saldo Akhir Kas	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Rp57.137.568.443,40	Rp36.832.311.496,23

Saldo Akhir merupakan jumlah kenaikan/penurunan kas selama Tahun Anggaran 2020 ditambah dengan saldo awal kas di Kasda (Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2019) yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.107 Rincian Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode 2020
 (dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	20.305.256.947,17	20.221.733.014,17
Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	36.832.311.496,23	16.610.578.482,06
Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	57.137.568.443,40	36.832.311.496,23
Saldo Akhir Kas	57.137.568.443,40	36.832.311.496,23

Rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	44.047.092.182,91
Kas di Bendahara Penerimaan	1.598.154.300,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.145.616.777,00
Kas di BLUD	5.193.352.812,49
Kas di Bendahara JKN	1.163.746.043,00
Kas di Bendahara Dana BOS	3.750.482.990,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<u>239.123.338,00</u>
Jumlah	57.137.568.443,40

5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.534.951.256.014,71 dan Rp1.786.552.519.971,93.

2. Surplus /(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp210.960.599.044,29) dan Rp1.634.622.193.035,71. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya untuk tahun 2020 terdiri dari:



Tabel 5.108 Rincian Koreksi Ekuitas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020
1	Koreksi kurang peralatan dan mesin	(585.508.000,00)
2	Koreksi kurang peralatan dan mesin	(26.473.500.000,00)
3	Koreksi tambah peralatan dan mesin	4.632.713.391,90
4	Koreksi kurang gedung dan bangunan	(398.099.000,00)
5	Koreksi tambah gedung dan bangunan	2.275.360.546,00
6	Koreksi tambah jalan, jaringan dan irigasi	9.663.813.707,01
7	Koreksi tambah tanah	22.081.733.000,00
8	Koreksi kurang tanah	983.316.300,00
9	Koreksi kurang aset lain-lain	(81.600.000,00)
10	Koreksi kontraaksi dalam pengerjaan	79.280.000,00
11	Koreksi akumulasi penyusutan	45.561.643.222,57
12	Koreksi akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(52.675.068.366,00)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	5.064.084.801,48

Laporan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2020 terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp3.534.951.256.014,71
- b. Surplus / Defisit – LO (Rp210.960.599.044,29) merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar meliputi:
 - 1) Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp27.059.008,00) berasal dari adanya penyerahan ke SMK Titanis dan Kehutanan; kendaraan yang telah di DUM; ubah kondisi berdasarkan hasil inventarisasi Tahun 2020; tidak tergolong aset; adanya distribusi dari OPD lain; pembayaran utang tahun 209/pindah ke aset tidak berwujud dan adanya koreksi salah catat di Sekretariat Daerah sebesar Rp26.474.500.000,00. Sedangkan untuk koreksi tambah nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp4.632.713.391,90 karena adanya hibah dari pemerintah pusat; mutasi aset karena inventarisasi tahun 2020; belanja modal tahun 2020, distribusi dari OPD lain; mappingan dari Permendagri Nomor17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; utang tahun 2020 dan koreksi dana bos tahun 2020.
 - 2) Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp398.099.000,00), merupakan nilai koreksi saldo awal; pembongkaran gedung sesuai SK Penghapusan Nomor 485/XII/Tahun 2020; ubah kondisi berdasarkan hasil inventarisasi; KDP tahun 2020; tidak tergolong aset; distribusi ke OPD lain; pembayaran utang tahun lalu dan mappingan dari Permendagri Nomor17 Tahun 2007 ke Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Untuk koreksi tambah nilai aset tetap gedung dan bangunan merupakan penambahan dari penilaian KPKNL; hibah dari pemerintah pusat; inventarisasi tahun 2020; belanja modal tahun 2020; distribusi dari OPD lain; dan reklas dari KDP tahun 2019 ke aset permanen di tahun 2020.
 - 3) Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp9.663.813.707,01 merupakan penambahan dari penilaian KPKNL; hibah dari pemerintah pusat; belanja modal tahun 2020; utang tahun 2020; distribusi dari OPD lain; kapitalisasi aset (biaya umum) dan reklas dari KDP tahun 2019 ke aset permanen tahun 2020.
 - 4) Koreksi Tambah Nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp22.081.733.000,00 merupakan penambahan dari penilaian KPKNL dan penilaian tanah di bawah irigasi. Koreksi Kurang Nilai Aset Tanah sebesar (Rp983.316.300,00) merupakan pengurangan karena adanya penyerahan aset tetap ke Provinsi sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 481/XII/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020.



- 5) Koreksi Kurang Nilai Aset Lain-lain sebesar (Rp81.600.000,00) berasal dari penghapusan aset lainnya tahun 2020.
- 6) Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp79.280.000,00 karena adanya reklas dari KDP tahun 2019 ke aset permanen tahun 2020.
- 7) Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp45.561.643.222,57 karena adanya perubahan atas koreksi tambah/kurang dari nilai aset tetap.
- 8) Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar (Rp52.675.068.366,00) karena adanya penambahan koreksi aset tidak berwujud.

4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.3.329.054.741.771,90 dan Rp3.534.951.256.014,71.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja

1. Pembentukan

Kabupaten Tana Toraja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

2. Letak Geografis

Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Tana Toraja secara geografis terletak antara 2^o-3^o Lintang Selatan dan 119^o-120^o Bujur Timur yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang;
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu;
- Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat –
Kabupaten Luwu

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 2.054,30 km². Iklim Kabupaten Tana Toraja tergolong iklim tropis basah temperatur suhu rata-rata berkisar antara 17,9^oC – 30,5^o C dengan kelembaban udara antara 82-86%, curah hujan rata-rata sekitar 1500mm pertahun sampai lebih dari 3500 mm/tahun. Topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang di kelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya di atas 25%. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara <300 m - > 2500 m di atas permukaan laut.

3. Pemerintahan

Wilayah Kabupaten Tana Toraja terbagi atas 19 Kecamatan. Sampai dengan saat ini terdapat 112 Lembang dan 47 Kelurahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2019 sebanyak 4.518 orang.

4. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari:

- Bupati Tana Toraja : Ir. Nicodemus Biringkanae
- Wakil Bupati Tana Toraja : Victor Datuan Batara, SH
- Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja : Welem Sambolangi, SE
- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tana Toraja : Evivana Rombe Datu, S.Pd, MM
- Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tana Toraja: Yohanis Lintin Paembongan, S.Th

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
 - Sekretaris Daerah : Dr. Ir. Semuel Tande Bura, MM
 - Sekretaris Daerah membawahi:
 - Asisten Pemerintahan Umum : Ir. Isak Maraya Allo Somba
 - Asisten Ekonomi Pembangunan : Ir. Haris Paridi
 - Asisten Administrasi Umum : Sulaiman Malia, S.Sos, M.Si
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dinas/Badan/Kantor sebanyak 33 (tiga puluh tiga)
4. Kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas)



Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara, SH masa jabatan 2016-2021 merupakan periode pertama setelah menjadi pemenang dalam Pilkada Serentak Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2015, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 dan dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016.

B. Terkait Pengalihan Urusan Pemerintah Daerah Sebagai Berikut :

Berdasarkan dasar hukum pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumentasi (P3D) Bidang Pendidikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah setelah ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB VII

PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melalui proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah, selain itu LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bertekad untuk terus berupaya meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk Tana Toraja lebih baik.

BUPATI TANA TORAJA

THEOFILUS ALLORERUNG

